

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DAMPINGAN DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
(Studi Kasus di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Tahun 2023)
SKRIPSI
Sarjana Sosial (S.Sos)**



Di susun oleh:

Ainnaya Dwi Agustina

2006016073

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ainnaya Dwi Agustina

NIM : 2006016073

Jurusan : Ilmu Politik

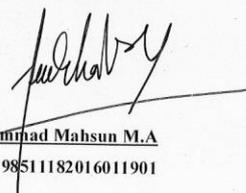
Judul Skripsi : Implementasi Program Desa Dampingan dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 26 April 2024

Pebimbing



Muhammad Mahsun M.A

NIP: 198511182016011901

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DAMPINGAN DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN DI JAWA TENGA (Studi Kasus di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten
Grobogan)

Disusun oleh :

Ainnaya Dwi Agustina

2006016073

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 17 Mei 2024 dan dinyatakan lulus.

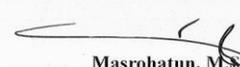
Susunan Dewan Penguji

Ketua



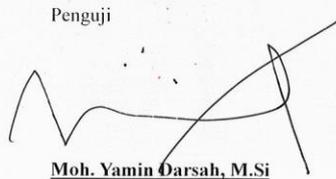

Muhammad Mahsun M.A
NIP: 198511182023211019

Sekretaris



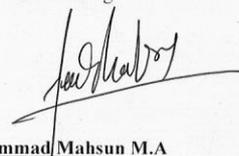
Masrohatun, M.S.
NIP: 198806212018012001

Penguji



Moh. Yamin Oarsah, M.Si
NIP: 198409092019031007

Pembimbing



Muhammad Mahsun M.A
NIP: 198511182023211019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Implementasi Program Desa Dampungan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2024

Yang menyatakan



Aindaya Dwi Agustina

NIM: 2006016073

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Politik di Uin Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul *“Implementasi Program Desa Dampungan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Jawa Tengah (Studi kasus di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan).*

Selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa penulis dapatkan. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, Kesehatan, dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Rektor Uin Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, MAg yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Uin Walisongo Semarang;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada mahasiswa Ilmu Politik;
4. Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan, saran, kritik, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
5. Segenap jajaran Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta motivasi sehingga dapat mengimplementasikan ke dalam penyusunan skripsi;
6. Segenap jajaran dosen dan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang;
7. Permata hati penulis Ibu Chaeriyah (Almh) seseorang yang biasa saya sebut ibu terimakasih banyak penulis ucapkan atas pelajaran hidup, dukungan, motivasi dan

doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagaimana perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan pada tahap ini, meskipun perjalanan selanjutnya harus saya lewati tanpa engkau temani lagi;

8. Ayah penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Bapak Nurkhoyin orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang sudah diberikan. Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Namun mampu mendidik dan gigih dalam memanjatkan doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
9. Kakak tercinta Andhika Kusvintoro dan kakak ipar Wika Sadewi atas segala dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan mampu menyelesaikan skripsi dengan baik;
10. Ibu sambung penulis Ibu Umayah atas segala doa dan bantuannya;
11. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan Lilis Setyowati, Della Ayu Rukmana, Umi Kholifah, dan Noviani Nazeria Hakim karena telah memberikan motivasi serta dukungan dalam pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Seluruh teman-teman Ilmu Politik C Angkatan 20 terimakasih karena telah menemani berproses dan menimba ilmu bersama di UIN Walisongo Semarang. *See you on top guys*;
13. Teruntuk Axel Qurattu A'yun 2006016078 penulis mengucapkan terimakasih karena senantiasa mendampingi, membantu, menemani berproses dari maba, PPL, KKL, KKN hingga Skripsi serta menjadi tempat keluh kesah penulis selama di Semarang. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis;
14. Kepada pihak-pihak yang berada dibalik layar yang berkontribusi dalam memberikan dukungan serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Terakhir, untuk diri sendiri, terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun poses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan semaksimal mungkin yang patut dibanggakan untuk diri sendiri;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat

penulis harapkan demi kesempurnaan dan peningkatan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang Ilmu Politik. Penulis ucapkan terimakasih.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua insan yang selalu menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan cinta sejati dalam hidupku Bapak Nur Khoyin dan Ibu Chaeriyah (Almh) yang telah mendampingi, mendidik, dan memberikan segala bentuk pengorbanan untuk penulis. Tidak ada kata-kata betapa besar rasa terimakasihku kepada kalian. Semoga persembahan sederhana ini menjadi ungkapan kecil dan rasa cinta penulis kepada kalian berdua.

MOTTO

Dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu)

(Qs. An-Nisa' 4:45)

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum:60)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah
hingga ia kembali”

(H.R Tirmidzi)

ABSTRAK

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah ialah rendahnya akses pelayanan dasar, meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, kesehatan, serta lemahnya pengembangan kehidupan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat program terobosan baru yakni Program Desa Dampungan, adanya program ini untuk menekan angka kemiskinan khususnya di 14 kabupaten prioritas, salah satu kabupaten prioritas itu adalah Kabupaten Grobogan dan salah satu daerah yang berada pada level kemiskinan ekstrem tersebut adalah Desa Mlilir. Melalui studi kasus di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan penulis memfokuskan studi ini pada dua ranah kajian sebagai berikut: 1). Bagaimana implementasi pelaksanaan program desa dampungan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan?. 2). Bagaimana dampak program desa dampungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan?.

Analisis implementasi program desa dampungan menggunakan teori Merilee S.Grindle. untuk melihat proses implementasi melalui isi kebijakan terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dikomitmen. Serta melalui lingkungan kebijakan terdiri dari kekuasaan, peran aktor, dan kepentingan, karakteristik lembaga, daya tanggap dan kepatuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna melihat proses implementasi serta pelaksanaan program desa dampungan di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

Hasil analisis data menunjukkan Implementasi program desa dampungan berlangsung secara demokratis, kemudian mendapat respon positif dari masyarakat karena isi kebijakan memuat kepentingan masyarakat serta peranan aktor pelaksana yang berperan aktif dalam perwujudan kepentingan masyarakat. Program desa dampungan memiliki dampak peningkatan pendapatan, menggerakkan ekonomi lokal masyarakat Desa Mlilir, mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan kualitas hidup. Proses implementasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program desa dampungan sangat penting eksistensinya dalam pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di Desa Mlilir keberhasilan tersebut dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan,

Kata Kunci: Kemiskinan, Program Desa Dampungan, Desa Mlilir

ABSTRACT

The factual condition faced by the poor population of Central Java is low access to basic services, including access to decent housing, affordable food, education, health, as well as weak development of sustainable living. To overcome this problem, the Central Java Provincial Government created a new breakthrough program, namely the Assisted Village Program, this program is to reduce poverty rates, especially in 14 priority districts, one of the priority districts is Grobogan Regency and one of the areas that is at the extreme poverty level. is Mlilir Village. Through a case study in Mlilir Village, Gubug District, Grobogan Regency, the author focuses this study on two areas of study as follows: 1). How is the implementation of the assisted village program in overcoming poverty in Mlilir Village, Gubug District, Grobogan Regency? 2). What is the impact of the assisted village program on improving community welfare in Mlilir Village, Gubug District, Grobogan Regency?

Analysis of the implementation of the assisted village program using Merilee S. Grindle's theory. to see the implementation process through the policy content consisting of influencing interests, type of benefits, degree of change, location of decision making, program implementation, committed resources. As well as through the policy environment consisting of power, actor roles and interests, institutional characteristics, responsiveness and compliance. This research uses a qualitative method with a case study approach to look at the implementation process and implementation of the assisted village program in Mlilir Village, Gubug District, Grobogan Regency.

The results of data analysis show that the implementation of the assisted village program took place democratically, then received a positive response from the community because the policy content contained community interests and the role of implementing actors who played an active role in realizing community interests. The assisted village program has the impact of increasing income, stimulating the local economy of the Mlilir Village community, reducing the burden of expenses and improving the quality of life. In the implementation process above, it can be concluded that the existence of the assisted village program is very important in alleviating community poverty, especially in Mlilir Village. This success is proven by the reduction in poverty rates.

Keywords: Poverty, Assisted Village Program, Mlilir Village

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERILEE S. GRINDLE	14
BAB III	23
LANDSCAPE DESA MLILIR.....	23

A. Profil Desa Mlilir	23
1. Kondisi Geografis Desa Mlilir	23
2. Demografi	24
3. Kondisi ekonomi.....	26
4. Kelembagaan Desa	28
5. Masalah Desa.....	29
B. Karakteristik Kemiskinan Masyarakat Desa Mlilir	31
C. Program Desa Dampungan.....	32
BAB IV.....	40
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA DAMPINGAN DALAM	
MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA MLILIR, KABUPATEN	
GROBOGAN.....	40
A. Proses Implementasi Program Desa Dampungan.....	40
B. Faktor Pengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Program Desa	
Dampungan.....	43
B.1 Faktor Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>).....	43
BAB V	71
DAMPAK PROGRAM DESA DAMPINGAN TERHADAP PENINGKATAN	
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MLILIR, KECAMATAN GUBUG,	
KABUPATEN GROBOGAN.....	71
1. Peningkatan Pendapatan	72
2. Menggerakkan Ekonomi Lokal.....	Error! Bookmark not defined.
3. Mengurangi Beban Pengeluaran dan Peningkatan Kualitas Hidup	Error!
Bookmark not defined.	
BAB VI.....	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Table 1 jumlah penduduk desa mikir per rw	25
Table 2 Jumlah penduduk Desa Mlilir menurut kelompok umur	25
Table 3 keagamaan penduduk	26
Table 4 Struktur Pendidikan penduduk	26
Table 5 Struktur mata pencaharian penduduk	27
Table 6 Kepemilikan Ternak	27
Table 7 Nama Pejabat Pemerintah Desa Mlilir	28
Table 8 Nama Badan Permusyawaratan Desa Mlilir	28
Table 9 Anggota TPK Desa Mlilir	30
Table 10 Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Mlilir	30
Table 11 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	33
Table 12 Proses Implementasi Program Desa Dampungan.....	41
Table 12 Rekapitulasi Desa Dampungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	50
Table 13 Laporan Kegiatan Desa Dampungan.....	51
Table 14 Anggaran Program Desa Dampungan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Pendekatan Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980)	18
Gambar 2 peta desa semilir	24
Gambar 3 Pelaksanaan Bantuan RTLH	58
Gambar 4 Pelaksanaan Jambanisasi	58
Gambar 5 Terlaksananya pemberian bantuan sembako	58
Gambar 6 Sebelum pemberian bibit jambu air	75
Gambar 7 Sesudah pemberian bibit jambu air	75
Gambar 8 Sebelum jambanisasi dan air bersih	78
Gambar 9 Sesudah jambanisasi dan air bersih	79
Gambar 10 Sebelum pembangunan jamban	79
Gambar 11 Sesudah pembangunan jamban	79
Gambar 12 Perbaikan RTLH	81
Gambar 13 Sesudah perbaikan RTLH	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan bagi negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan kemiskinan tersebut menyangkut pembangunan pada masyarakat di desa maupun di kota-kota besar (Gani, 2022). Salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi ialah Jawa Tengah berada pada urutan kedua setelah Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tercatat angka kemiskinan pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 10,93% (3831,44 ribu penduduk) (BPS Prov. Jateng, 2022). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah mencapai angka 14,44% (4811,30 ribu penduduk). Data ini menjelaskan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun indeks angka kemiskinan penduduk Jawa Tengah mengalami penurunan sejumlah 3,51%, atau (979,86 ribu penduduk), (BPS Prov. Jateng, 2013).

Berdasarkan penyelidikan yang saya lakukan penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan program yang di implementasikan oleh Pemerintah Jawa Tengah seperti pengentasan kemiskinan melalui PKH (Program Keluarga Harapan) yang berjalan sejak tahun 2007 dan ditujukan untuk keluarga miskin, kelompok rentan, maupun penyandang disabilitas. Program bantuan sosial ini terbuka untuk akses penerima dalam memanfaatkan pelayanan sosial dari aspek pendidikan maupun kesehatan (Arif, 2020). Bukan hanya itu, upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang dilakukan melalui Program Renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dilihat dari segi kelayakan rumah (Magdalena & Utomo, 2021). Selanjutnya, pemerintah menggandeng Baznas (Bantuan dari Badan Akmil Nasional) mengadakan program pelatihan seperti dalam bidang kuliner dan usaha rumahan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan (Awwahah & Iswanaji, 2022).

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga diadopsi pada sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa Barat yang mengadopsi Program Petani Milenial, untuk

memenuhi misi Jawa Barat yaitu peningkatan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital, dan digunakan sebagai pemulihan ekonomi pasca covid-19 (Mulyati, Setyawati, & Suganda, 2022). Program selanjutnya ialah OPOP (*One Pesantren One Product*) dengan tujuan untuk menekan pesantren untuk memiliki produk unggulan agar lembaga tersebut mandiri dari segi ekonomi (Tama, 2023). Program semacamnya juga diadopsi di Jawa timur yaitu dengan pemberian bantuan modal usaha untuk UMKM seperti Program Kredit Sejahtera, Kredit Usaha Rakyat, dan Dana Gulir (Hakim & Nashrullah, 2023).

Pentingnya kebijakan atau Program pengentasan kemiskinan yang diadopsi oleh Pemerintah daerah tersebut telah mendorong sejumlah sarjana untuk melakukan kajian ilmiah terkait dengan Implementasi program diantaranya Santifa, dkk (2019) evaluasi program penelitian ini menarik bagi pembaca agar dapat melihat faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam dijalankannya kebijakan dan kedepannya dapat menjadi evaluasi atau pembelajaran kebijakan agar lebih maksimal lagi (Santifa, Warjio, Harahap, & Isnaini, 2019). Selanjutnya studi yang sama dilakukan oleh Priyanto & Noviana (2018) menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan karena dalam memecahkan masalah di pemerintahan dibutuhkan proses dalam membuat kebijakan (Priyanto & Noviana, 2018). Sebagian studi juga memfokuskan kesuksesan suatu program Jumriani (2023), Sasmito & Nawangsari (2019) kesuksesan program didukung peran para aktor khususnya pemerintah setempat dalam pelaksanaan serta partisipasi masyarakat (Jumriani, 2023). Dari penyidikan saya terhadap sejumlah literatur menemukan bahwa secara umum studi yang ada mengkaji program pengentasan kemiskinan melihat sisi terkait perencanaan, implementasi program, evaluasi kebijakan, maupun kesuksesan dari program.

Studi ini ingin memperkaya kajian kajian ilmiah yang dilakukan oleh para sarjana sebelumnya tentang Program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji Implementasi Program Desa Dampungan dalam menanggulangi kemiskinan yang diadopsi oleh Pemerintah Jawa Tengah, berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Jawa Tengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023 bahwa penanggulangan kemiskinan dengan program “1 OPD minimal 1 desa miskin” dengan konsep kolaborasi pihak

lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi). Program ini diluncurkan pada 22 Juli 2019. Program ini adalah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan khususnya pada 14 Kabupaten prioritas yang masuk golongan miskin ekstrem. Bentuk Program dari desa dampingan ini meliputi Pemberdayaan desa, RTLH, dan Jambanisasi (Jatenggayeng, 2023). Satu perangkat satu desa yang dimaksud disini ialah satu perangkat daerah satu desa binaan. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Pemerintah kabupaten, Pemerintah desa, maupun Stakeholder terkait yang bersama sama dalam mengentaskan kemiskinan, dan peran perangkat disini sebagai fasilitator, mengevaluasi efektivitas intervensi program, menjalin kolaborasi antar perguruan tinggi maupun dunia usaha, serta mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (Pemprov Jateng, 2019).

Untuk melengkapi studi diatas, penulis tertarik untuk mengkaji Program Desa Dampingan di Jawa Tengah dengan mengambil Studi kasus di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Studi di wilayah ini dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Grobogan sendiri masuk dalam kategori zona merah. Dalam Rakor yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa Program RTLH tertinggi menysasar pada Kabupaten Grobogan dengan jumlah 7.114 unit, 24 rumah belum teraliri listrik, selain soal listrik Ganjar menyampaikan bahwa ada 3.147 keluarga di Grobogan belum memiliki jamban, kemudian 553 keluarga tidak memiliki sumber air minum (Kominfo, 2023). Hal itu juga disampaikan oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni bahwa pada 2022 tingkat warga miskin ekstrem di Kabupaten Grobogan sebesar 2,29% (31,740 orang) (ling, 2023).

Dari pemaparan diatas Desa Mlilir masuk pada daftar PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) yang berjumlah 923 desa pada 17 kabupaten prioritas di Jawa Tengah (Pemprov Jateng, 2023). Dalam menanggulangi kemiskinan di Desa ini stakeholder terkait melakukan pendampingan bersama perangkat desa setempat untuk mengintervensi jenis bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat diantaranya adalah jambanisasi yang diberikan kepada 18 rumah tangga, penyaluran bibit jambu air dan rambutan, bantuan sembako dari Bank Mayapada, bantuan RTLH sebanyak 10 unit CSR dari Baznaz, dan bantuan pada keluarga dengan kondisi miskin ekstrem

sebanyak 30 orang (Mlilir, 2023). Dari bantuan yang di Intervensi berikut anggaran yang dialokasikan untuk desa mlilir berjumlah Rp. 1.057.500.000 (Kesbangpol Jateng, 2023). Dari fokus upaya yang disampaikan Ganjar Pranowo tersebut, Program Desa Dampungan ini digencarkan guna menekan angka kemiskinan salah satunya di Desa Mlilir. Kedua, Desa ini dipilih untuk dilakukannya penelitian karena kemiskinan di desa tersebut sangat ekstrem dilihat dari masyarakat yang tinggal disana kebanyakan berada pada usia tidak produktif sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta, fisik bangunan yang ditinggali masyarakat desa mlilir bisa dikategorikan dalam rumah tidak layak huni.

Melalui studi kasus di Desa mlilir Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, saya ingin memfokuskan studi ini pada dua ranah kajian. Pertama, penulis mengkaji bagaimana implementasi pelaksanaan Program Desa Dampungan dalam mengentaskan kemiskinan. Kedua, dampak dari Program Desa Dampungan ini apakah menunjukkan hasil pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Mlilir, Kabupaten Grobogan.

Signifikansi dari studi ini penting dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, studi Program Desa Dampungan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana politik itu bekerja dalam proses dampungan di Desa Mlilir Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dalam mengentaskan kemiskinan. Kedua, studi ini juga menyumbangkan tentang wajah lain dinamika politik di desa Mlilir. Ketiga, memberi wacana bagi sarjana lain tentang Implementasi kebijakan Program Desa Dampungan.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan menjawab tiga pertanyaan kunci berikut:

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan program desa dampungan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana dampak program desa dampungan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mlilir, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di Desa Mlilir, Kabupaten Grobogan ini memiliki tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi dari Program Desa Dampungan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
2. Dampak Program Desa Dampungan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini akan dijabarkan menjadi dua yaitu manfaat secara bidang akademis dan manfaat dalam bidang pemerintahan Adapun mengenai penjelasannya dapat dituliskan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai fenomena yang terjadi terhadap Implementasi Program Desa Dampungan dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian disini diharapkan mampu menjadi rujukan penelitian berikutnya yang lebih relevan. Dan menjadi evaluasi dalam Program Desa Dampungan.

E. Tinjauan Pustaka

Pada Tinjauan Pustaka ini penulis membagi dua tema kajian yang membahas mengenai Pertama, tentang Program bantuan sosial. Kedua, tentang Program pemberdayaan, dari dua tema tersebut pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dua kegiatan program. Maka studi pengentasan kemiskinan banyak dilakukan oleh banyak sarjana dalam dua kelompok tema kajian. Penjelasan lebih lanjut bagaimana para sarjana sebelumnya mengkaji tentang Program pengentasan kemiskinan akan dijelaskan dibawah ini.

1. Program Bantuan Sosial

Kajian pertama yang paling relevan dari topik Program bantuan sosial ialah dari Mursyidah (2017) dan Wahidah, dkk (2022). Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas Program Bantuan Tunai bersyarat dalam mengatasi kemiskinann dan kelaparan. bagaimana prosedur dalam penyaluran bantuan

sosial yang didalamnya ada berbagai serangkaian pembagian data yang kemudian dari data tersebut bisa memperoleh data keluarga yang akan dibagikan bantuan, bantuan sosial disini berupa bantuan sembako dan uang tunai. Jenis-jenis bantuan tersebut diantaranya ada PKH maupun BST.

Kajian oleh Putra (2019) dan Qamariah, dkk (2020) berfokus pada bagaimana bantuan sosial yang diberikan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa aspek yang tidak berjalan dengan baik. Aspek tersebut dari capaian tujuan, sasaran, integrasi, maupun adaptasi. Pelaksanaan Program Bantuan sosial dapat dikatakan berhasil jika dalam aspek integrasi terpenuhi misalnya besarnya peran pemerintah setempat dalam menjalankan program ini dan dukungan dari masyarakatnya. Maka, bisa dikatakan program ini berhasil meskipun ada hambatan didalamnya. Kajian oleh Khotimah & Hertati (2021) menemukan selain adanya hambatan diatas yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan maka disini perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan menerima bantuan, karena dengan hal ini hambatan dalam penyaluran bantuan akan berkurang. Serta, yang menjadi faktor keberhasilan terkait sasaran. Disini perlu dilakukannya pendataan secara rutin karena bisa berubah-ubah maka, dari hal tersebut perlu diadakannya survei secara rutin agar penerima bantuan tepat sasaran.

2. Program Pemberdayaan

Kajian tentang Program Pemberdayaan yang paling relevan ialah Hertika, dkk (2021), Nardin (2019), dan Suryati & Salkiah (2019) . Dalam pemberdayaan program ketiga ini diharapkan masyarakat dapat secara mandiri dalam menerapkan program pemberdayaan yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Karena tujuan utama dari program pemberdayaan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri. Dalam program ini pemerintah berperan besar dalam pelaksanaan program. Meskipun, ada hambatan di dalamnya salah satunya terkait anggaran jika anggaran yang diberikan sedikit maka, program tersebut akan terhambat karena minimnya anggaran yang diberikan.

Studi Santifa, dkk (2019) dan Kehik (2018) menyatakan bahwa dengan adanya program ini hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat. Maka dalam pelaksanaannya program ini berjalan baik dan bisa dikatakan optimal karena dari pihak kelurahan mampu menciptakan kelompok

antar masyarakat dan dari gotong-royong inilah program ini dapat berjalan optimal. Selain itu, perlu dilakukannya skala prioritas oleh pemerintah setempat untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan masyarakat agar pemberdayaan dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan pada studi terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Program penanggulangan kemiskinan tidak luput dari pembahasan mengenai perencanaan, implementasi, evaluasi, maupun kesuksesan ataupun kegagalan. Mengenai Program Desa Dampungan ini sebelumnya belum pernah ada yang mengkaji. Maka dalam penelitian ini akan menambah wacana bagi sarjana lain yang akan mengkaji Program Desa Dampungan. Maka, perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya terletak pada jenis program bantuan.

F. Kerangka Teori

1. Definisi konseptual

a. Program Desa Dampungan

Desa Dampungan sendiri merupakan target dari desa lokasi yang dapat memenuhi kriteria agar dapat dilaksanakan intervensi dari penanggulangan kemiskinan, terkhusus dari 48 desa yang menjadi prioritas utama menurut data makro. Pemilihan dari lokasi desa yang nantinya akan mendapat dampungan ataupun pembinaan berdasarkan pada tingkat kriteria kesejahteraan terendah desa, hal ini merupakan hasil dari pengolahan data sejumlah rumah tangga pada desil 1 maupun desil 2 pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial dengan perbandingan dari tingkat kesejahteraan desa di satu kecamatan.

Desil 1 sendiri ialah rumah tangga/individu dilihat melalui kondisi kesejahteraan sampai pada 10% yang paling rendah di Indonesia, yang menunjukkan pada kategori yang sangat miskin, sedangkan pada Desil 2 yang merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan berkisar pada angka 11%-20% golongan paling rendah yang ada di Indonesia, dengan menunjuk pada kategori rumah tangga miskin. (Kesbangpol Jateng, 2022)

Desa Dampungan memprioritaskan pada Desa yang miskin ekstrem yang tergolong pada prioritas utama yang nantinya akan dilakukan pendampungan desa tersebut yang diharapkan pada pendampungan desa miskin ini mampu mengentaskan kemiskinan dan keluar dari garis kemiskinan.

b. Implementasi kebijakan

Arti dari Implementasi kebijakan sendiri ialah sebagai sebuah pengupayaan di dalam memahami suatu kebijakan secara komprehensif, Artinya, pemahaman tersebut menggiring kepada pemahaman tentang implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan masalah yang krusial dan tidak sepenuhnya dapat menghilangkan kemiskinan. Implementasi kebijakan yang meliputi kepada upaya dalam mengelola input yang digunakan dalam menghasilkan output maupun outcomes untuk masyarakat. Tahap dalam implementasi kebijakan ini bisa dilihat dengan ciri maupun bisa dibedakan pada tahap dalam membuat kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan disini satu sisi ialah proses dengan memiliki logika bottom-up, dengan artian proses dalam sebuah kebijakan dapat diawali oleh penyampaian aspirasi, permintaan maupun dukungan oleh masyarakat. Sedangkan, dalam implementasi sebuah kebijakan di sisi yang lainnya mempunyai logika top-down, yang artinya penurunan alternatif kebijakan yang bersifat abstrak ataupun makro yang bisa jadi Tindakan yang konkrit ataupun mikro (Wibawa, 1994).

c. Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Nakluy (2015) kemiskinan pada suatu wilayah terjadi pada saat terjadinya kondisi dimana pada kelompok masyarakat pada dua kondisi diantaranya masyarakat yang secara menyeluruh ada pada tempat yang jauh maupun sangat terpencil atau bisa dibidang dengan tempat yang ditandai dengan keterbatasan sumber daya dan termasuk didalamnya ada ketimpangan yang cukup mencolok antar yang kaya dan yang miskin (Nakluy, 2015).

Definisi Kemiskinan menurut Bank Dunia (2000) yaitu kemiskinan ialah kehilangan kesejahteraan, Sedangkan yang menjadi inti dalam permasalahan ini yaitu pada Batasan dari kesejahteraan. Kemiskinan yang absolut hidup dari pendapatan dibawah USD satu dollar perhari dan untuk kemiskinan menengah pendapatan ada dibawah dua dollar perhari.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dikutip dari Anggito (2018) menurut Denzin & Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dalam latar alamiah

dan memiliki tujuan dalam menafsirkan fenomena dengan menggunakan berbagai metode (Anggito & Setiawan, 2018).

Terkait dari judul penelitian ini, selanjutnya penulis sebagai pelaku utama akan mengkaji lebih lanjut implementasi dari program mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah dengan pengamatan secara keseluruhan agar mendapat penafsiran serta jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis diatas. Penelitian ini akan dilakukan secara natural dan tidak ada yang dimanipulasi karena dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data untuk menjawab persoalan-persoalan di rumusan masalah.

Kemudian dari penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah studi kasus menurut Creswell dalam Assyakurrohim, dkk (2022) studi kasus adalah peneliti menggali kasus di suatu waktu dan kegiatan yang dilakukan secara mendalam dan melibatkan banyak sumber (Assyakurrohim & dkk, 2022) pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi terkait dampak sebelum dan sesudah adanya program tersebut.

2. Sumber dan jenis data

Sumber data yang paling utama di dalam penelitian kualitatif adalah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer sendiri ialah data yang didapatkan dari wawancara langsung oleh Badan Kesbangpol Jateng (Kesatuan Bangsa dan Politik), Kepala Desa Mlilir, Perangkat desa, serta masyarakat desa Mlilir yang mendapat intervensi bantuan, sumber data primer ini yang kemudian menjadi penyelesaian dalam menjawab persoalan diatas.
- b. Data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, serta artikel ilmiah dan data terkait dokumen kebijakan Program kebijakan Jawa Tengah, Dokumen kebijakan Program Desa Dampungan Jawa Tengah, RPJMDes Desa Mlilir, Dokumen terkait pelaksanaan Program Desa Dampungan di Desa Mlilir, serta foto-foto hasil kegiatan dari Program desa Dampungan kemudian data sekunder ini yang mejadi bentuk data tambahan dalam menjawab rumusan masalah diatas.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara menurut Creswell dalam Sugiyono (2016) ialah pengumpulan data dengan melibatkan peneliti maupun partisipan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman. Dalam melakukan wawancara, penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, peneliti mempersiapkan instrumen berupa pertanyaan penelitian yang tertulis tetapi tidak mempersiapkan alternatif jawaban dari pertanyaan penelitian seperti halnya wawancara terstruktur, letak wawancara semi terstruktur berada pada penggabungan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, yang bertujuan untuk menemukan suatu rumusan masalah agar terbuka dengan memintai pendapat dari pihak yang diwawancara (Sugiyono, 2016).

Teknik pemilihan narasumber dalam penelitian ini ialah *Snowball sampling* yaitu mengambil data sedikit demi sedikit kemudian menjadi besar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, Pada penentuan narasumber, peneliti sudah menentukan siapa saja tokoh yang akan di wawancarai yaitu rumah tangga yang menerima adanya bantuan tersebut. Kemudian narasumber yang sudah ditetapkan diawal akan dimintai informasi terkait siapa saja aktor yang terlibat dan layak untuk dijadikan sumberdata yang nantinya akan memperkuat sumber informasi dalam penelitian (Wekke & dkk, 2019).

Sasaran informan pada penelitian ini antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Desa Mlilir, Perangkat desa Mlilir, serta masyarakat terkait yang mendapat intervensi bantuan. Nantinya data yang didapatkan dalam bentuk informasi akan dijadikan data.

b. Observasi non partisipasi

Menurut Moloeng dalam Makbul (2021) Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati hal yang berhubungan langsung dengan ruang, kegiatan, serta waktu peristiwa kemudian dilakukan pencatatan atas hasil fenomena dan dilakukan dengan sistematis. Teknik dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, disini peneliti hanya menjadi pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan (Makbul, 2021). Observasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data terkait kondisi lingkungan Desa Mlilir, dan keadaan warga desa. Teknik ini digunakan untuk menjawab faktor penyebab yang menjadi keberhasilan maupun kegagalan program.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam mengungkap peristiwa, objek, serta tindakan lain yang akan menambah pemahaman pada masalah yang diteliti (Rukajat, 2018). dokumentasi dalam penelitian ini data terkait Dokumen Kebijakan Program kebijakan Jawa Tengah, dokumen kebijakan Program Desa Dampungan Jawa Tengah, RPJMDes Desa Mlilir, dokumen terkait pelaksanaan Program Desa Dampungan di Desa Mlilir, serta foto-foto hasil kegiatan dari Program desa Dampungan yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut untuk membantu menjawab dari rumusan diatas terkait dampak terlaksanya Program Desa Dampungan dilihat dari sebelum dan sesudah adanya program tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Data yang didapat setelah melakukan observasi dan pengumpulan data melalui wawancara, kemudian data tersebut dianalisis lebih lanjut agar data tersebut bermanfaat, Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles & Huberman (1994) dengan melewati tiga tingkatan antara lain reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Pengambilan data dengan reduksi data dilakukan cara merangkum maupun memilih data lapangan yang menjadi prioritas utama penting dengan berhubungan pada topik penelitian dengan maksud agar mendapatkan pemahaman maupun kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penyajian data

Terkait permasalahan yang diteliti pada studi ini, data akan disajikan dalam bentuk tabel dan bagan. Dari penyajian tersebut diharapkan informasi yang didapat tertata rapi dengan harapan agar mudah dipahami dalam menarik kesimpulan.

c. Hasil analisis

Hasil analisis ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi hasil akhir dari penelitian ini. Dalam penelitian disini, hasil yang diperoleh dari kelengkapan analisis data digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi

program Desa Dampungan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Mlilir, Kabupaten Grobogan.

H. Sistematika Penulisan

Diperlukan sistematika didalam penulisan agar memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi dan memberi gambaran secara keseluruhan, dalam skripsi ini terbagi dalam 7 Bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan alasan penulisan penelitian, menjelaskan fenomena yang diteliti dengan diberikan data maupun data sesuai dengan konteks penelitian. Disini, akan dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir sistematika dalam penulisan dalam membantu pembaca memahami isi bab dari penelitian ini.

BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MARILEE S. GRINDLE

Dalam bab ini berisikan teori yang digunakan sebagai landasan analisis data secara mendalam tentang bagaimana Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle untuk menjadi acuan dalam memahami data penelitian serta jawaban penelitian. Di dalam Menyusun kerangka teori berdasar pada suatu hal yang menjadi objek penelitian

BAB III LANDSCAPE DESA MLILIR, KECAMATAN GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN

Dalam bab ini berisikan gambaran terkait dengan objek penelitian yang dilakukan. Profil Desa Mlilir yang memuat Kondisi Geografis, Potensi Desa, Sumber daya manusia, permasalahan yang dihadapi desa Mlilir, serta

BAB IV IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA DAMPINGAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA MLILIR, KABUPATEN GROBOGAN

Dalam bab ini menjelaskan Bagaimana Implementasi Program Desa Dampungan dalam menanggulangi kemiskinan apakah sudah terlaksana dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Mlilir.

BAB V DAMPAK PROGRAM DESA DAMPINGAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MLILIR, KABUPATEN GROBOGAN

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai Dampak program Desa Dampingan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mlilir, Menjelaskan dan menganalisis dampak program tersebut apakah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mlilir.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang terdapat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan memuat saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan rujukan atau referensi yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi.

BAB II

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERILEE S. GRINDLE

Di dalam melakukan Analisa diperlukan kerangka teori yang digunakan penulis agar dapat memahami fokus penelitian. Dalam diskusi ini peneliti akan menjabarkan teori “Implementasi kebijakan” yang dicetuskan oleh Marilee S. Grindle guna memahami sejauh mana implementasi kebijakan mengenai Program Desa Dampungan.

Kebijakan publik, yang juga dikenal sebagai *public policy*, merujuk pada semua keputusan dan tindakan yang berasal dari pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi, kesehatan, pertahanan, dan berbagai kebijakan lainnya. Selain itu, dalam konteks hirarki, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal, dan mencakup berbagai bentuk seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, kebijakan menteri, peraturan daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Implementasi kebijakan merupakan proses Tindakan administratif yang diberikan oleh pemerintah maupun sektor swasta yang dipergunakan dalam mencapai tujuan tertentu. Model yang diperkenalkan ini merupakan gambaran dari proses dalam pengambilan sebuah keputusan. Menurutnya bisa disebut dengan kebijakan jika mampu untuk mencapai tujuan Bersama. Dengan artian keberhasilan dari implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari bagaimana implementasi tersebut sudah sesuai atau tidak yang kemudian dari masyarakat yang akan menilainya, kemudian, keberhasilan dari suatu kebijakan yaitu dari kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai dari suatu program, tingkat perubahan yang diharapkan oleh kebijakan, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan (Grindle, 1980).

Teori Grindle, yang dikenal dengan istilah "*Implementation as Political and Administrative Process*", menyoroti bahwa kesuksesan suatu program dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya, yang menandakan apakah tujuan yang ingin dicapai berhasil tercapai atau tidak. Dalam mengevaluasi kesuksesan suatu program, ada dua aspek yang dapat diperhatikan: pertama, proses kebijakan, yakni sejauh mana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan dan mengarah pada pelaksanaan yang efektif. Kedua, dalam mencapai

tujuan tersebut, penting untuk memperhatikan dampak atau efek yang terjadi, baik secara individu maupun dalam masyarakat secara keseluruhan, serta sejauh mana kelompok sasaran menerima perubahan tersebut. Faktor-faktor seperti konten kebijakan dan konteks pelaksanaannya juga turut memengaruhi seberapa besar keberhasilan kebijakan publik. Jadi, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dirancang, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan bagaimana konteks sosial dan politik mempengaruhi pelaksanaannya.

Menurut Marilee S. Grindle, keberhasilan implementasi, seperti yang diungkapkan dalam Subarsono (2011: 93), dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Faktor-faktor ini mencakup seberapa baik kepentingan kelompok sasaran atau target group tercermin dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, seberapa besar perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, apakah lokasi program sudah tepat, apakah implementornya telah dijelaskan secara rinci dalam kebijakan, dan apakah program tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan mencapai tujuannya dengan baik, tanpa lebih atau kurang dari itu. Dalam menerapkan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah yang tersedia: pertama, implementasi langsung dalam bentuk program; atau kedua, melalui formulasi kebijakan turunan atau derivatif dari kebijakan publik tersebut. Proses implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas, dimulai dari level program, kemudian turun ke proyek, dan akhirnya ke kegiatan.

Model ini mengadopsi mekanisme yang umum dalam manajemen, terutama dalam manajemen sektor publik. Kebijakan dijabarkan dalam bentuk program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi proyek-proyek, dan akhirnya direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Tindakan-tindakan ini melibatkan upaya untuk mengubah keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, baik untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan. Dua variabel yang berpengaruh pada implementasi dari sebuah kebijakan yang kemudian dua variable ini bisa menjadi ukuran dari keberhasilan sebuah kebijakan. Proses kebijakan melihat dari jalannya implementasi kebijakan pada program yang mengarah kepada tindakan dari pembuat kebijakan. Capaian dari tujuan kebijakan, melihat dampak kebijakan kepada masyarakat dan melihat sejauh mana perubahan yang terjadi (Mubarok & dkk, 2020).

Dalam bukunya, *Politics and Policy Implementation in The Tird World*, Grindle mengatakan bahwa studi implementasi kebijakan selalu melibatkan investigasi dan analisis terhadap program-program aksi konkret yang telah dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang lebih luas. Implementasi merupakan sebuah proses umum tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Keberhasilan dan kegagalannya dapat dievaluasi dari segi kapasitas guna melaksanakan program-program yang telah dirancang. Proses implementasi hanya dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran umum telah ditentukan, meliputi sumber dana yang akan dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Intervensi juga merupakan bagian penting dari proses pembuatan kebijakan, yang menyebabkan implementasi kebijakan dan intervensi saling berkaitan. Setelah implementasi, langkah berikutnya adalah mengelola kebijakan, menciptakan tujuan bersama melalui kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan dalam sebuah organisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan itu sendiri. Ada dua aspek yang mempengaruhi keterlaksanaan kebijakan: konten kebijakan dan konteks kebijakan. Konten mencakup kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, tingkat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, program pelaksanaan, dan sumber daya yang digunakan. Konteks mencakup kekuatan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, serta karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan serta respon dari pelaksana. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten dan konteks yang telah ditetapkan bersama, memungkinkan untuk mengevaluasi apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan harapan, serta untuk mengetahui apakah kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan dan individu atau kelompok tertentu, yang berpotensi menyebabkan perubahan.

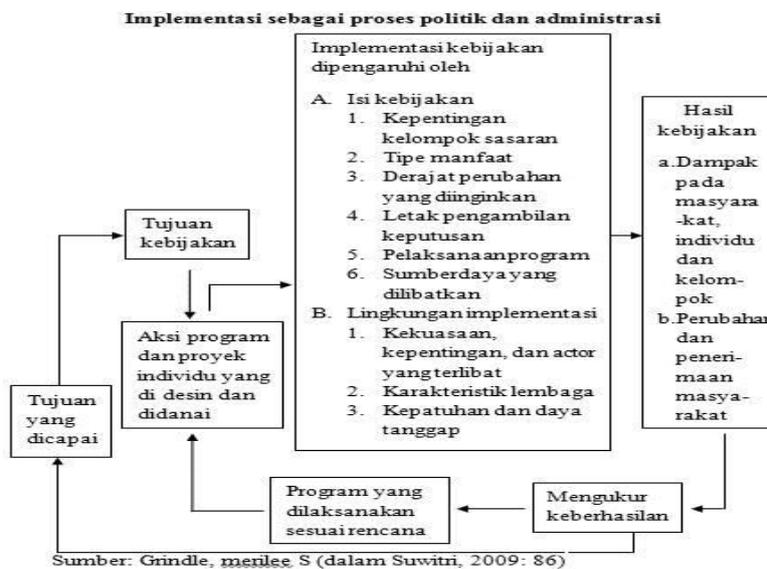
Pengimplementasian dimulai dari kondisi yang abstrak dari sebuah pertanyaan tentang apakah program desa dampingan ini bisa berhasil, Grindle (1980) faktor yang mempengaruhi implementasi dalam kebijakan Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil bisa diukur dari *outcomes* (akhirnya). Proses dalam pengimplementasian ketika tujuan maupun sasaran telah ditentukan, saat kebijakan dirumuskan dan dana yang kemudian dialokasikan. Tetapi, dalam hal ini mengenai perumusan dan pengimplementasian merupakan masalah yang sulit untuk dipraktikkan. Hal ini, disebabkan karena dampak dari prosedur implementasi yaitu dengan menuntut pada aturan pedoman yang kemudian menjadi masalah pada lokasi pengimplementasian kebijakan. Fakta yang paling penting dari proses implementasi ialah bagaimana implementasi itu berlangsung yaitu dilihat dari bagaimana dampak dari implementasi tersebut dan bagaimana alokasi dana dalam mencapai tujuan. Selain itu, proses implementasi dipengaruhi oleh tipe tujuan yang ingin dicapai.

Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980), dikutip oleh Djiwowijoto (2006:132) model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan mencapai tujuannya dengan baik, tanpa lebih atau kurang dari itu. Dalam menerapkan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah yang tersedia: pertama, implementasi langsung dalam bentuk program; atau kedua, melalui formulasi kebijakan turunan atau derivatif dari kebijakan publik tersebut. Proses implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas, dimulai dari level program, kemudian turun ke proyek, dan akhirnya ke kegiatan. Model ini mengadopsi mekanisme yang umum dalam manajemen, terutama dalam manajemen sektor publik. Kebijakan dijabarkan dalam bentuk program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi proyek-proyek, dan akhirnya direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Tindakan-tindakan ini melibatkan upaya untuk mengubah keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, baik untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari dua hal diantaranya proses dalam kebijakan yang mengartikan bahwa dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan apa yang dicapainya. Dalam pencapaian kebijakan tersebut dapat dilihat impact atau efeknya bagi penerima kebijakan. Selain itu, keberhasilan juga ditentukan dari tingkat keterlaksanaan kebijakan diantaranya ada dua variable yakni enam elemen kebijakan dan tiga elemen konteks implementasi. Model Implementasi kebijakan Grindle digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Model Pendekatan Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980)



Gambar tersebut menjelaskan bahwa mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pencapaian hasil akhirnya (*Outcomes*), yaitu apakah sudah tercapai tujuan yang sudah ditentukan. Pengukuran implementasi suatu kebijakan dilihat dari dua hal. Pertama, dari proses, apakah program/kebijakan tersebut sudah sesuai dengan design dan dilihat dari aksi kebijakannya. Kedua, tujuan kebijakan apakah sudah tercapai atau tidak, yaitu dengan melihat dua faktor yakni dampak yang dirasakan pada masyarakat dan perubahan bagi si penerima.

Menurut Grindle, model implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang mencakup aspek politik dan administratif. Grindle menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, di mana hasil akhirnya dipengaruhi oleh program atau hubungan antara pembuat keputusan dalam konteks administratif. Proses politik tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dalam kebijakan itu sendiri, sementara proses administratif dapat diamati dalam proses umum terkait tindakan administratif yang terjadi di tingkat program.

Beberapa negara lebih dulu melakukan implementasi kebijakan, dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia ketiga meliputi Brasil, Kolombia, India, Kenya, Meksiko, Peru dan Zambia. Mereka mengusung kebijakan terkait elektrifikasi pedesaan, pelayanan kesehatan, serta pembagunan pedesaan hingga pembangunan pertanian dan penyediaan tempat tinggal. Hal utama dalam pelaksanaan implementasi tersebut, adanya keterlibatan sumber daya yang dialokasikan serta siapa yang akan menerima manfaat dari program pemerintah. Khususnya berpenghasilan rendah dan berstatus rendah, keberhasilan implementasi didasarkan pada pilihan serta keputusan yang diambil serta menganalisis konsekuensi yang akan diterima.

Dalam konteks ini, Grindle menekankan bahwa implementasi tidak sekadar merupakan proses mekanis untuk mengubah tujuan kebijakan menjadi prosedur rutin. Grindle menyoroti kompleksitas implementasi yang melibatkan konflik, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Dalam penerapan teori Grindle pada penelitian ini mengacu pada faktor-faktor yang meliputi variabel yang menjadi penentu keberhasilan implementasi menurut Grindle, yaitu:

a. *Content of policy* (isi dari kebijakan), yang meliputi;

1. *Interst affected*

Wujud kepentingan yang mempengaruhi ini berkaitan langsung dengan kepentingan dari suatu implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan bahwa pelaksanaan dalam kebijakan pasti berhubungan dengan kepentingan dan dari kepentingan tersebut dilihat sejauh mana kepentingan tersebut dapat berpengaruh

pada implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, kepentingan yang mendorong implementasi Program Desa Dampungan di Desa Mlilir Kabupaten Grobogan.

2. Type of Benefits

Tipe manfaat merupakan isi dari sebuah kebijakan dapat menjelaskan bahwa di suatu kebijakan memiliki tipe manfaat positif atau dengan kata lain manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat penerima. Dalam penelitian ini, Program Desa Dampungan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Mlilir harus memiliki manfaat atau pengaruh positif dari hasil implementasinya.

3. Extend of Change Envision

Derajat perubahan, dari sebuah kebijakan tentunya memiliki target yang harus dicapai. Dengan artian bahwa dalam implementasi suatu kebijakan haruslah memiliki perubahan yang besar serta memiliki skala capaian yang jelas. Kebijakan Program Desa Dampungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui jambanisasi, penyaluran bibit jambu air dan rambutan, bantuan sembako dari Bank Mayapada, serta bantuan RTLH harus memberikan perubahan bagi Desa Mlilir.

4. Site of Decision Making

Letak dalam mengambil keputusan, ini memegang peranan yang sangat penting dari sebuah pengambilan keputusan dan bisa dilihat apakah keputusan yang diambil sudah tepat. Dalam penelitian ini letak pengambilan keputusan kebijakan Program Desa Dampungan melalui program jambanisasi, penyaluran bibit jambu air dan rambutan, bantuan sembako dari Bank Mayapada, serta bantuan RTLH dalam menanggulangi kemiskinan dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik.

5. Program Implementer

Aktor dari pelaksanaan program, disini dapat dilihat dalam mendukung keberhasilan program aktor yang dibutuhkan harus kompeten serta harus terdata apakah kebijakan menyebutkan implementatornya secara terperinci. Dalam upaya implementasi Program Desa Dampungan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini akan mengetahui aktor atau tim dalam pengimplementasian program tersebut di Desa Mlilir. (kesbangpol)

6. *Ressource Committed*

Sumber daya yang dikomitmen artinya sumber daya apa yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini. Pelaksana dari program kebijakan harus menggunakan sumberdaya yang memadai agar program/kebijakan berjalan baik (Fajarwati & Rahmadila, 2022). Implementasi Program Desa Dampungan di Desa Mlilir akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila Sumber Daya dalam pelaksanaannya memiliki kemampuan dan mampu menjalankan kebijakan.

b. *Context of Implementation* (Konteks atau Lingkungan Implementasi)

1. *Power, interest, strategy of actor involved*

Kekuasaan, Peran aktor, dan kepentingan merupakan seberapa besar kekuasaan actor dalam pengimplentasian kebijakan, institusi yang berkuasa, respon dari penerima kebijakan. Dari pengimplementasi kebijakan ini para aktor harus mempunyai strategi dalam menyukseskan kebijakan, jika para aktor tidak memiliki strategi tentunya besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan lancar. Dalam menjalankan implementasi kebijakan Program Desa Dampungan di Desa Mlilir, tentunya memiliki aktor-aktor yang berperan penting dalam upaya keberhasilan program.

2. *Institution an Regine Characteristic*

Karakteristik suatu lembaga maupun pemerintahan yang memiliki wewenang dalam merealisasikan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berhasil atau tidak ditentukan dari lingkungan kebijakan itu sendiri, dalam hal ini akan dilihat karakteristi suatu lembaga turut serta mempengaruhi kebijakan. Kaitanya dengan penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga yaitu Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat harus dapat mengatur dan mengalokasikan Dana Desa tersebut agar Program Desa Dampungan dapat diterima oleh masyarakat miskin di Desa Mlilir.

3. *Compliance and responsive*

Tingkat kepatuhan serta tanggapan pelaksana, ukuran kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran pembuat kebijakan. Hal ini penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan sebab respon maupun kepatuhan dari pihak pelaksana dilihat bagaimana mereka menanggapi kebijakan tersebut, setelah pelaksanaan kebijakan dipengaruhi dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, maka akan terlihat dari pembuat kebijakan sudah sesuai dari yang diharapkan serta kebijakan

apakah bisa dipengaruhi oleh lingkungan sehingga dapat membawa perubahan (Muhtadi, 2020). Dalam penelitian masyarakat yang menerima Program Desa Dampingan di Desa Mlilir memberikan tanggapan positif atau negatif dengan adanya program tersebut.

Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah menghadapi persoalan antara kedua variabel di atas. Pemerintah harus mampu mengatasi masalah untuk mencapai tujuan yang dinyatakan di dalam kebijakan. Pengatasan masalah tersebut dapat diatasi melalui bentuk dukungan politik, kepatuhan badan pelaksana, birokrat yang ditugaskan dalam melaksanakan program, elit politik yang menjalankan, serta penerima manfaat yang dituju. Kebijakan tersebut tentunya tidak lepas dari sebuah konflik, sebab badan-badan di bawah pemerintah akan menimbang apakah program tersebut akan memberikan kerugian maupun keberhasilan. Sebab, perwujudan kebijakan tentu membutuhkan sumber daya yang kompeten. Menurut McClintock dalam Grindle (1980:24), menyatakan bahwa kebijakan publik yang akan diimplementasikan haruslah jelas dan tidak ambigu serta dapat disepakati oleh pejabat politik dan administratif di semua tingkatan dan administratif di semua tingkatan dalam hirarki pemerintahan. Apabila kebijakan yang ditentukan tidak memiliki arah yang jelas, implementasi program akan mengalami kesulitan yang berujung pada tidak terkontrolnya jalannya program.

Pemikiran Merilee S. Grindle dalam menilai suatu kebijakan dirasa cukup komprehensif, sebab Grindle tidak hanya berfokus pada bentuk implementasi melainkan mengarah pada implementer, penerima implementasi, serta beberapa konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi hingga sumber daya yang diperlukan dalam realisasi program kebijakan. Penelitian Program Desa Dampingan di Desa Mlilir akan melihat perwujudan implementasi dari kacamata Merilee S. Grindle melalui *context of policy* dan *context of implementation* yang menjadi dasar pemikiran. Melalui kedua variabel tersebut, dapat diketahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal diimplementasikan dalam Program Desa Dampingan di Desa Mlilir dalam mengatasi kemiskinan.

BAB III

LANDSCAPE DESA MLILIR

A. Profil Desa Mlilir

1. Kondisi Geografis Desa Mlilir

Secara Geografis Desa Mlilir terletak pada posisi 07 03 02 lintang selatan dan 110 42 14 Bujur Timur. Topografi ketinggian des aini adalah berupa dataran yaitu sekitar 128 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Grobogan tahun 2019, selama tahun 2019 curah hujan di Desa Mlilir rata-rata mencapai 4.400 mm. Curah hujan hampir sepanjang tahun tidak ada musim kemarau, yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2019-2025.

Secara administratif, Desa Mlilir terletak di wilayah kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Manggar wetan, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemiri Kecamatan Gubug di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Saban. Jarak tempuh Desa Mlilir ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 40 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Desa Mlilir terletak di sebelah selatan sekitar 40 km dari kota Grobogan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

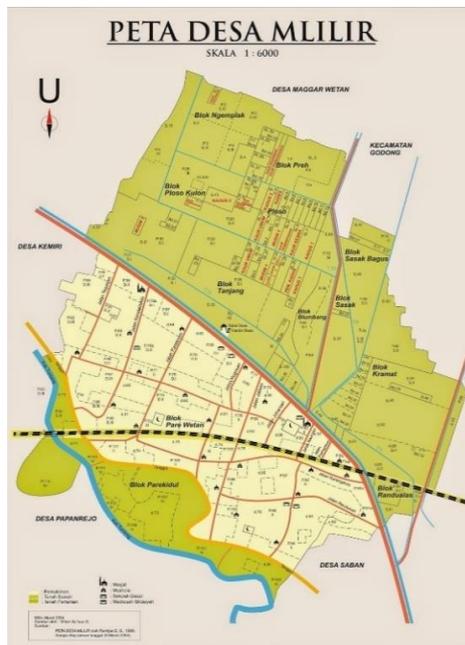
- Sebelah utara: Desa Manggar wetan
- Sebelah timur: Desa Saban
- Sebelah selatan: Desa Papan Rejo
- Sebelah barat: Desa Kemiri

1.1 Luas Wilayah

- Luas Desa Mlilir: 320.041 H
- Pemukiman : 87 H
- Pekarangan : 3.897 H
- Sawah : 157.284 H
- Perkebunan : 53.564 H
- Prasarana umum: 18,296 H
- Jumlah : 320.041 H

Desa Mlilir terdiri dari 6 Rw, dan 24 Rt

Gambar 2 peta desa semilir



Sumber: Dokumen Desa Mlilir

2. Demografi

1.1 Jumlah Penduduk

Banyaknya penduduk Desa Mlilir diketahui sebesar 4.139 jiwa, terdiri dari 2.055 jiwa laki-laki dan 2.084 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,35 dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Mlilir rata-rata sebesar 375 jiwa per Km². Dengan penyebaran penduduk perdusun sebagai berikut:

Table 1 jumlah penduduk desa mikir per rw

Rukun warga	Jiwa			
	KK	Laki-laki	Perempuan	Total
Rw 01	196	309	303	612
Rw 02	184	287	292	579
Rw 03	156	230	259	489
Rw 04	225	360	343	703
Rw 05	306	459	468	927
Rw 06	268	410	419	829
Jumlah	1.335	2.055	2.084	4.139

Sumber: Dokumen Desa Mlilir tahun 2019

Table 2 Jumlah penduduk Desa Mlilir menurut kelompok umur

No.	Kelompok umur	L	P	Jumlah
1.	0-4	151	39	290
2.	5-9	168	164	332
3.	10-14	156	144	300
4.	15-19	166	162	328
5.	20-24	150	143	293
6.	25-29	181	162	344
7.	30-34	173	182	355
8.	35-39	181	191	327
9.	40-59	520	545	1.065
10.	60+	209	251	460
Jumlah		2.055	2.084	4.139

Sumber: Dokumen Desa Mlilir tahun 2019

1.2 Keagamaan penduduk

Penduduk Desa Mlilir mayoritas memeluk agama islam dan Sebagian kecil memeluk agama lain yaitu kristen sebagai berikut:

Table 3 keagamaan penduduk

No.	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	4.139
2.	Kristen	0
3.	Katholik	0
4.	Budha	0
5.	Hindu	0
Jumlah		4.139

Sumber: Dokumen Desa Mlilir 2019

Table 4 Struktur Pendidikan penduduk

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Tamat SD	1.188
2.	Tamat SLTP	982
3.	Tamat SLTA	697
4.	Tamat D2	6
5.	Tamat D3	28
6.	Tamat S1	71
7.	Tamat S2	5
8.	Tamat S3	1
Jumlah		4.139

Sumber: Dokumen Desa Mlilir tahun 2019

3. Kondisi ekonomi

3.1 Mata Pencaharian

Desa Mlilir adalah desa pertanian, karena masyarakatnya Sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa, dll. Sebagaimana dalam tabel struktur mata pencaharian sebagai berikut:

Table 5 Struktur mata pencaharian penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	PNS	35
2.	TNI/POLRI	8
3.	Karyawan	578
4.	Wiraswasta	588
5.	Tani	837
6.	Pertukangan	2
7.	Buruh tani	16
8.	Pensiunan	14
9.	Tidak tetap	10
Jumlah		2.088

Sumber: Dokemen Desa Mlilir tahun 2019

3.2 Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Mlilir adalah sebagai berikut:

Table 6 Kepemilikan Ternak

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Ayam	1.053 KK
2.	Itik	17 KK
3.	Kambing	146 KK
4.	Sapi	13 Kk
5.	Menthok	106 KK
Jumlah		1.355 KK

Sumber: Dokumen Desa Mlilir tahun 2019

4. Kelembagaan Desa

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Mlilir tidak bisa lepas dari struktur administrative pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Table 7 Nama Pejabat Pemerintah Desa Mlilir

No.	Nama	Jabatan
1.	Mohammad Khambali	Kepala Desa
2.	Abdul Latif	Sekretaris Desa
3.	M. Agus Arifin	Kasi Pemerintahan
4.	Jazuri	Kasi Kesra
5.	Endang Sulistyana	Kaur Umum dan TU
6.	Andi Sutejo	Kaur Keuangan
7.	Nur Rochim S.Pt	Kasi Perencanaan
8.	Abdul Kholiq	Kasi Pelayanan
9.	Masrian	Kadus II

Sumber: Dokumen Desa Mlilir tahun 2019

Table 8 Nama Badan Permusyawaratan Desa Mlilir

No	Nama	Jabatan
1.	Mashudi S.Pd	Ketua
2.	Sunarto	Wakil Ketua
3.	Anis Kutria	Sekretaris
4.	Suganjar	Anggota
5.	Achmad Saliq	Anggota
6.	Muh Suyadi	Anggota
Jumlah		6 Orang

Sumber: Dokumen Desa Mlilir tahun 2019

Table 9 Anggota TPK Desa Mlilir

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	Sugiyanto	Ketua
2.	Masriah	Sekretaris 1
3.	Endang Sulistyana	Sekretaris 2
4.	Anggi Sutejo	Bendahara
5.	Daryadi	Anggota

Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa

5. Masalah Desa

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun, Hasil dari Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Mlilir:

Table 10 Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Mlilir

No	Bidang	Permasalahan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor RT belum ada 2. Papan nama RT/RW belum ada 3. Buku Administrasi RT/RW belum ada 4. Papan Informasi RT/RW belum ada 5. Kesejahteraan RT/RW

2.	Pelaksanaan Pembangunan di Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan masih becek 2. Saluran sanitasi rusak 3. Saluran irigasi belum ada 4. Jalan rusak/berlubang 5. Talud jalan belum ada 6. Batas dukuh belum ada 7. Pagar makam belum ada 8. Taman bacaan belum ada 9. Jalan usaha tani becek 10. Sumur dalam belum ada 11. Gedung PAUD belum ada 12. Jalan kurang lebar
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan ibu-ibu jamaah yasin 2. Pembinaan karang taruna 3. Belum ada group kesenian 4. Pembinaan pertanian

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pembinaan trantib 6. Pembinaan kewirausahaan
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Sarana produksi kurang memadai 3. Pemasaran sulit 4. Bahan baku melimpah 5. Pengolahan belum bisa 6. Pelatihan wirausaha 7. Pelatihan pembuatan makanan ringan 8. Pelatihan pertanian 9. Pelatihan peternakan 10. Pengolahan limbah ternak

Sumber: Dokumen Desa Mlilir tahun 2019

B. Karakteristik Kemiskinan Masyarakat Desa Mlilir

Dikutip dari Mualifah (2019) Pengertian kemiskinan ialah kondisi masyarakat atau individu yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk mempertahankan maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Kemiskinan keadaan dimana terjadinya ketimpangan ekonomi. Dari data yang sudah dihimpun dengan Kepala Desa Mlilir sebesar atau sebanyak 64 Kartu Keluarga Pemerintah Desa.

C. Program Desa Dampungan

1. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”**, prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;

2. Satgas kemiskinan, Bantuan desa, Rumah Sederhana Layak Huni

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi dan *focusing* penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, pengembangan kepeloporan dan kepedulian pemuda (PKPP), dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 OPD minimal 1 desa miskin” dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, Lembaga zakat, perguruan tinggi).

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulant perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni

diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri. Bentuk implementasi program ini adalah pemberian bantuan keuangan untuk stimulant bantuan RSLH, untuk seluruh desa, dan/atau kelurahan.

Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

*Table 11 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023*

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata,	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Penyediaan <i>basic life acces</i> untuk penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, pada kelompok petani, nelayan, buruh, dan pelaku UKM, meliputi: a) Akses rumah sederhana dan lingkungan Kawasan permukiman layak huni termasuk air bersih, sanitasi,

			<p>dan listrik; c) Perlindungan dan jaminan sosial; d) Kepemilikan administrasi kependudukan; e) Akses KB</p>
			<p>Penguatan <i>Sustainable livelihood</i> (keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui: a) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha; b) Pengembangan <i>startup</i> wirausaha baru; c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>
			<p>Penguatan kelembagaan, basis data, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan</p>

			yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan satuan tugas pengentasan kemiskinan
		Menurunnya pengangguran terbuka	Menurunkan pengangguran melalui upaya: a) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja b) perluasan kesempatan kerja; dan c) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan

			pengawasan tenaga kerja
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran, investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, utamanya melalui: a) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek <i>on-farm</i> dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisme pertanian dan

			<p>pengembangan pertanian organic. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (<i>of-farm</i>), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal Kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; b) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi; c) Pengembangan kawasan pertanian dengan</p>
--	--	--	--

			<p>konsep “agriculture estate”, yaitu pendampingan dan pengembangan usaha tani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan potensi lokal Kawasan;</p> <p>d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.</p>
--	--	--	--

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Kemudian dalam pelaksanaan Program desa dampingan ini juga memiliki dasar legalitas resmi diantaranya:

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
5. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

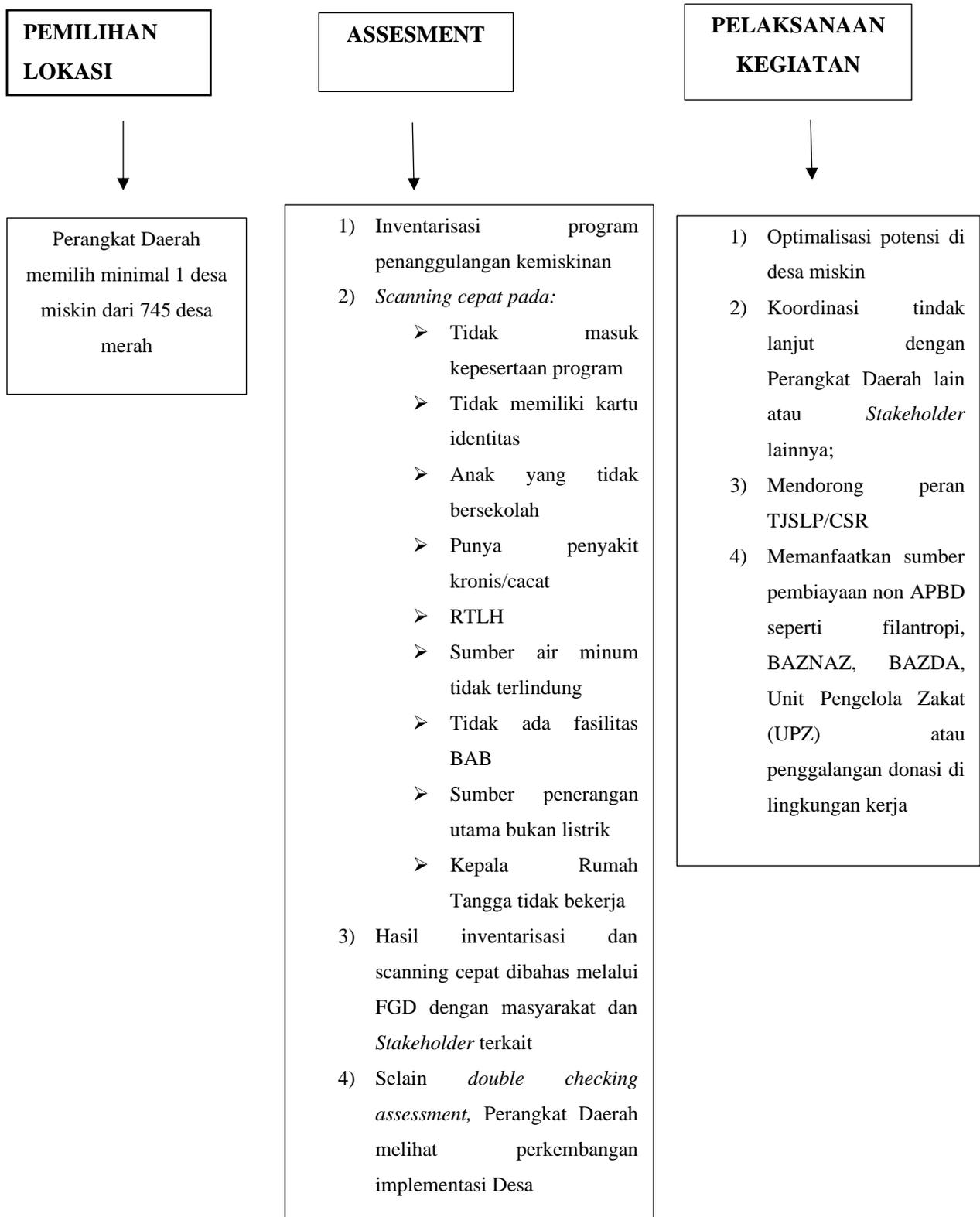
BAB IV

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA DAMPINGAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA MLILIR, KABUPATEN GROBOGAN

A. Proses Implementasi Program Desa Dampingan

Implementasi kebijakan adalah proses pembuatan kebijakan, proses pembuatan kebijakan merupakan sebuah proses politik yang didalamnya ada tahap-tahap pembuatan kebijakan kemudian divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang bergantung satu sama lain, diatur oleh waktu (Yuliah, 2020). Proses ini merupakan ruang untuk memaknai masalah publik serta prioritas dalam agenda publik, jika isu yang ada ditetapkan dalam masalah publik serta menjadi prioritas agenda publik, maka isu yang ada mendapatkan alokasi sumber daya prioritas daripada isu lain. Isu dalam Program Desa Dampingan ini termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah bahwa isu utama yang melatarbelakangi program ini karena sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah di dominasi wilayah pedesaan sebanyak 2,16 juta jiwa (12,80%), sedangkan penduduk miskin daerah perkotaan sebanyak 1,71 juta jiwa (9,67%). Tingginya angka kemiskinan di pedesaan khususnya pada golongan petani (butuh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh petani dan nelayan kecil). Berdasarkan isu tersebut, maka intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan ke wilayah pedesaan. Adapun proses implementasi akan ditampilkan bagan sebagai berikut:

Table 12 Proses Implementasi Program Desa Dampungan



Sumber: Buku Panduan Program Desa Dampungan

Pada bagan diatas tahapan implementasi Program Desa Dampungan diawali dengan pemilihan target lokasi dengan kategori kesejahteraan rendah (Desa Merah) pada 14 Kabupaten prioritas. Dilakukannya Program Desa Dampungan di Desa Mlilir karena adanya penggeseran daerah, penggeseran tersebut dilakukan karena arahan dari Gubernur Jawa Tengah untuk menggeser daerah yang masuk dalam kategori miskin sehingga seluruh *stakeholder* dan pemerintah daerah melakukan pemetaan kemiskinan, penilaian kemiskinan menggunakan konsep dari BPS (Badan pusat statistik) diukur dari sisi pengeluaran tiap rumah tangga. Permasalahan yang ada di Desa Mlilir ialah banyak masyarakatnya yang memasuki usia kurang produktif sehingga banyak yang tidak bekerja dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat yang tidak bekerja tentunya tidak memiliki pendapatan, mereka hanya mengandalkan penghasilan dari ternak maupun bergantung pada orang lain. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah menyimpulkan bahwa Desa Mlilir masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Setelah melakukan pemetaan daerah, kemudian dilakukan pemilihan sasaran penerima dengan *assessment*.

Pemilihan sasaran penerima diawali dengan proses penilaian atau *scanning*, adapun *scanning* didapat penulis di dalam basis data terpadu tahun 2018. Proses *scanning* adalah satu proses penilaian, dikutip dari Widodo (2021) bahwa *scanning* merupakan proses pemantauan terhadap lingkungan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan cara melakukan atau mengenali setiap perubahan yang terjadi (Widodo, 2021). Proses *Scanning* dapat memberikan informasi yang penting bagi pengambil keputusan untuk merespon dengan cepat dan efektif pada dinamika lingkungan yang terus berubah. Data *Scanning* pada Program Desa Dampungan diperoleh dari Data Terpadu PFM OTM, merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi maupun karakteristik 40% rumah tangga status kesejahteraan rendah yang sudah diolah oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil *scanning* cepat itu kemudian dikomunikasikan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk mendapatkan verifikasi dari berbagai pihak yang disepakati dalam forum Musdes tersebut.

Adapun *scanning* diatas dilakukan pembahasan menggunakan metode FGD, merupakan proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sifatnya spesifik dan dilakukan melalui diskusi kelompok, FGD yang terjadi

di Desa Mlilir membahas terkait hasil data *scanning*. Forum ini diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang perwakilan RT/RW setempat, forum tersebut membahas verifikasi data calon penerima bantuan apakah calon sasaran penerima layak untuk mendapatkan bantuan. Dari FGD tersebut kemudian didapatkan hasil keputusan bersama berupa data masyarakat yang layak untuk menerima bantuan. Dari proses implementasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi Program Desa Dampungan berjalan demokratis, karena melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan atas kesepakatan bersama.

B. Faktor Pengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Program Desa Dampungan

B.1 Faktor Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest affected*)

Grindle (1980) dalam Nurmayana (2022) bahwa pemikiran pembuatan kebijakan dari pelaksanaannya pasti ada banyak kepentingan yang termuat. Ini berarti bahwa kebijakan sendiri di dalam implementasinya pasti ada banyak kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya, kemudian dari kepentingan tersebut membawa pengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Pada Program Desa Dampungan ini kepentingan tersebut terletak pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 merupakan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun kedepan. Visi pembangunan Jawa Tengah “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari**” **Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**, merupakan keberlanjutan cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Demi mewujudkan kepentingan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Program Desa Dampungan dicanangkan dalam mempercepat penanganan kemiskinan selama lima tahun

“Kepentingan yang mempengaruhi ini ya sesuai sama RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan visi-misi Gubernur yaitu kesejahteraan masyarakat ini menjadi kepentingan utama dalam program ini. Selain itu, ya untuk pemberdayaan ekonomi lokal di desa-desa, kepentingan

yang lain penguatan infrastruktur dan layanan dasar seperti air bersih, dan sanitasi. Dari kepentingan tersebut Badan Kesbangpol membantu mewujudkan cita-cita dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah” (Wawancara Bapak Mohammad Khambali, 28 Februari 2024).

Kutipan wawancara diatas bahwa dalam indikator kepentingan yang mempengaruhi Badan Kesbangpol yang memiliki tugas dalam melakukan pendampingan maupun intervensi bantuan ini memiliki kepentingan untuk mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan ekonomi lokal di desa-desa, dan penguatan infrastruktur layanan dasar, kepentingan tersebut tidak lain dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan.

Responden selanjutnya memberi pendapat atas indikator kepentingan yang mempengaruhi. Menurutnya demi menurunkan angka kemiskinan atas dasar cita-cita pembangunan Jawa Tengah kemudian dibentuklah Program Desa Dampungan.

“Demi menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah ini sesuai dari apa yang tertuang dari isi dalam RPJMD mengenai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal serta inklusif dan berkualitas ini. Maka dibentuklah Program Desa Dampungan, program ini mencakup isi dari cita-cita pembangunan Jawa tengah. Diharapkan Program Desa Dampungan ini mampu menekan angka kemiskinan dan sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan” (Wawancara Bapak Abdul Latif, 12 Februari 2024).

Kutipan wawancara diatas apa yang menjadi kepentingan yang mempengaruhi, ialah demi mewujudkan cita-cita pembangunan Jawa Tengah, dibentuklah Program Desa Dampungan. Program ini didorong untuk semakin inklusif dan berkualitas yang didalamnya memuat pemberdayaan ekonomi lokal serta kegiatan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

b. Tipe manfaat (*Type of Benefits*)

Indikator Tipe manfaat menjelaskan di suatu kebijakan memiliki tipe manfaat positif, dengan kata lain tipe manfaat guna melihat manfaat positif pada masyarakat yang menerima bantuan, hal itu diterangkan dalam RPJMD Jawa Tengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk menanggulangi kemiskinan ini mempunyai manfaat bagi penerima atau masyarakat diantaranya; peningkatan kesejahteraan sekaligus kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan meliputi tercukupinya kebutuhan dasar warga seperti pangan, pendidikan, alat transportasi, komunikasi, perumahan dalam bentuk RTLH yang diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Masyarakat di Desa Mililir kebanyakan masyarakat yang sudah lanjut usia dan kelompok masyarakat yang tidak berpenghasilan karena memasuki usia yang tidak produktif. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dituliskan bahwa sasaran utama penerima bantuan dalam tiga kelompok rumah tangga yang berada pada 40% penduduk berpendapatan rendah diantaranya angkatan kerja yang bekerja tidak penuh termasuk didalamnya petani berlahan sempit, usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga dan yang terakhir penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

“Menjawab tipe manfaat dalam RPJMD Jawa Tengah terkait manfaat dari Program Desa Dampungan ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, desa yang menjadi target lokasi utama dalam percepatan kemiskinan didorong untuk dapat tercukupi kebutuhan dasarnya. Penanggulangan kemiskinan dengan cepat tidak dilakukan dengan hanya memberikan bantuan saja tetapi dilakukan dengan pemberdayaan lokal dengan begitu diharapkan masyarakat tidak bergantung pada pihak luar”
(Wawancara Bapak Abdul Latif, 12 Februari 2024).

Kutipan wawancara di atas bahwa dalam tipe manfaat RPJMD Jawa Tengah program ini dilakukan tidak hanya pemberian bantuan saja melainkan masyarakat didorong untuk mampu memberdayakan ekonomi lokal yang nantinya tipe

manfaat yang didapatkan adalah peningkatan pendapatan serta mengurangi ketergantungan dengan pihak luar.

“Program penanggulangan kemiskinan ini melibatkan masyarakat utama sebagai pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar maka, diharapkan masyarakat mendapat manfaat dari kontribusi mereka. Pendapatan yang meningkat sehingga mempersempit kesenjangan” (Wawancara Bapak Abdul Latif, 12 Februari 2024).

Beliau menambahkan bahwa dalam penanggulangan melibatkan masyarakat utama sebagai pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah kemudian terintegrasi dengan usaha besar, dari melibatkan partisipasi masyarakat yang memiliki usaha sehingga diharapkan mereka dapat memenuhi manfaat dari kontribusi mereka yang nantinya akan berdampak pada mengecilnya kesenjangan.

Sebagai penguat argumentasi kemudian wawancara dilakukan kepada salah satu penerima bantuan akan manfaat yang didapat dari berjalannya Program Desa Dampingan.

“Manfaat yang sudah saya dapatkan dari program ini ya saya cukup terbantu mbak jadi bisa menghemat disini saya mendapat dua bantuan sekaligus yakni bantuan modal usaha dan bantuan pemberian bibit jambu air, dari bantuan usaha yang saya dapatkan itu Rp.2.500.000 sangat cukup untuk pembelian modal untuk budidaya jamur, manfaat yang saya rasakan jadinya saya bisa menambah modal sehingga jamur yang saya budidaya banyak dari situ penghasilan saya meningkat. Kalau untuk pemberian bibit jambu air itu kan masih keil ya pohonnya jadi belum merasakan manfaatnya tapi pas disosialisasi kemarin mengenai bibit jambu air kan untuk masyarakat hasilnya diharapkan nantinya kalau berhasil kan bisa mbak buat tambah tambah penghasilan” (Wawancara Warga Ibu Darwati, 12 Februari 2024).

Menurutnya menjawab indikator tipe manfaat dari adanya Program Desa Dampungan ini responden merasa terbantu dari bantuan modal usaha yang diberikan dari modal yang diberikan tersebut dapat dijadikan tambahan modal sehingga dapat menambah penghasilan dan menghemat pengeluaran. Dan manfaat dari pemberian jambu air belum dirasakan karena bibit yang diberikan masih kecil dan belum berbuah. Responden kedua menyatakan pendapatnya terkait bantuan RTLH yang diterima, beliau merasakan manfaat akan adanya RTLH.

“Saya mengucapkan banyak terimakasih pada pemerintah setempat karena bantuan RTLH ini sangat bermanfaat bagi saya, dari perbaikan rumah ini saya merasakan manfaat sudah tidak banjir dan kehujanan lagi saya sudah merasakan aman dirumah mbak, dan saya juga tidak perlu memperbaiki genteng yang bocor sehingga saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperbaiki genteng” (Wawancara Warga Ibu Ngateni, 12 Februari 2024).

Kutipan wawancara diatas responden kedua menyatakan bahwa ia sudah merasakan manfaat dari adanya program bantuan ini manfaat yang sudah ia rasakan adalah dengan merasa aman berada dirumah karena sudah tidak merasakan atap yang bocor ia juga tidak perlu mengeluarkan pengeluaran untuk renovasi rumah. Responden ketiga berpendapat bahwa manfaat dari Program Desa Dampungan sudah dirasakan responden sudah melihat perubahan dari sebelum dan sesudah adanya program.

“Adanya program ini saya sudah melihat perubahan dari yang sebelumnya pengeluaran saya perbulan RP. 300.000 sekarang tidak mengeluarkan karena adanya bantuan uang dan sembako saya terbantu dengan adanya program tersebut” (Wawancara Warga Ibu Febi, 12 Februari 2023)

Responden kedua menyatakan bahwa manfaat yang sudah didapat dan program bantuan pemberian uang dan sembako sudah dirasakan, ia merasa dapat menghemat pengeluaran dan dapat membeli kebutuhan yang lain.

c. Derajat Perubahan (*Extend of Change Envision*)

Derajat perubahan ini berarti bahwa sebuah kebijakan tentunya memiliki target yang harus dicapai. Dengan artian bahwa dalam implementasi suatu kebijakan haruslah memiliki perubahan yang besar serta memiliki skala capaian yang jelas, implementasi kebijakan yang dibuat harus membawa perubahan bagi sekitarnya.

Indikator derajat perubahan terletak pada RPJMD Provinsi Jawa dalam visi-misi pembangunan Jawa Tengah 2018-2023 ini adalah Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata dan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif, berbasis potensi unggulan. Artinya perubahan yang diinginkan pada pembangunan Jawa Tengah yakni pemerataan kesejahteraan antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan serta diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada di Desa. Untuk mewujudkan cita-cita dari pembangunan Jawa tengah dibuatlah program desa dampingan yang diharapkan dapat pemeratakan tingkat kesejahteraan antara perdesaan dengan perkotaan. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan kesejahteraan, kesejahteraan yang diinginkan masyarakat yakni peningkatan kualitas hidup dan diringankan beban pengeluaran. Program desa dampingan dibentuk untuk mewujudkan hal tersebut.

“Terkait derajat perubahan atau tujuan dibentuknya Program ini sesuai dengan cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yakni kemiskinan jawa tengah menurun secara merata serta pemberdayaan ekonomi lokal, dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut sesuai visi-misi dengan memberikan kebutuhan pangan rumah, air bersih, kesehatan itu sudah terlaksana disini. Mengenai peningkatan kesjahteraan dalam memberikan bantuan pangan itu sudah terlaksan yakni pemberian sembako, RTLH juga sudah terlaksana, air bersih dan Kesehatan itu diberikan dalam bentuk bantuan jambanisasi, pembangunan kamar mandi, dan pamsimas dalam pemenuhan air bersih. Terkait pemberdayaan lokal tersebut diberikan bantuan bibit jambu air yang digunakan

dalam mengembangkan ekonomi desa” (Wawancara Bapak Mohammad Khambali, 12 Februari 2024).

Kutipan wawancara diatas derajat perubahan Program Desa Dampungan dalam peningkatan kesejahteraan sudah tercapai hal tersebut dibuktikan dari kegiatan penanggulangan diantaranya jambanisasi, RTLH, bantuan sembako untuk kebutuhan pangan, pamsimas untuk pemenuhan air bersih, serta pembangunan kamar mandi. Selanjutnya peningkatan dilakukan dengan mengembangkan ekonomi desa dengan diberikannya bibit jambu air. Sebagai penguat argumen, peneliti menanyakan kepada salah satu warga penerima bantuan terkait perubahan adanya Program Desa Dampungan sudah terlaksana atau belum terlaksana.

“Mengenai bantuan seperti RTLH dan Jambanisasi itu sudah selesai sih mbak, pemberian bantuan sembako sudah dilaksanakan saya juga sudah meraskan perubahan dari adanya program bantuan tersebut karena meringankan beban pengeluaran saya. Kalau untuk pemberian bibit jambu air sudah dikasih tapi saya sendiri belum merasakan manfaatnya” (Wawancara Warga Ibu Febi, 12 Februari 2024).

Responden pertama menyatakan bahwa derajat perubahan dari adanya Program Desa Dampungan dalam peningkata kesejahteraan sudah tercapai dibuktikan dari upaya pemerintah setempat dan OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan, pemeberian bantuan sudah terlaksana dengan baik dan responden sudah merasakan manfaatnya meskipun salah satu bantuan jambu air sebagai pemberdayaan masyarakat belum dirasakan.

d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Dalam kebijakan letak pengambilan keputusan memiliki peranan yang penting, pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan harus dijelaskan dahulu. Dalam pengambilan keputusan ini penting karena nantinya akan berpengaruh pada isi dari kebijakannya. Semakin banyaknya aktor yang terlibat maka implementasi kebijakannya akan sulit. Letak pengambilan keputusan diawali rakor bersama Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Bupati Demak Eisti'anah tepatnya di Balai Desa Mlilir Kecamatan Gubug, Ganjar Pranowo

menyampaikan bahwa ia meminta kepala desa agar satu minggu ini segera mendata, camat yang kemudian akan melakukan supervise, kemudian nantinya akan dikompilasi di Demak dan juga Grobogan (Antara, 2023).

Apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo diatas dalam kebijakan pengambilan keputusan ia memberikan arahan kepada salah satunya Bupati Grobogan untuk segera menggeser penanggulangan kemiskinan. Awalnya prioritas desa miskin ekstrem berjumlah 51 desa yang sudah dilakukan penanggulangan kemiskinan dari 51 desa tersebut yang belum terselesaikan dua yakni di Desa Bandungsari dan Desa Belor kecamatan Ngaringan, setelah adanya Rakor yang dilakukan di Desa Mlilir kecamatan Gubug tersebut penggeseran penanggulangan kemiskinan di geser ke Desa Mlilir. Di awal tahun 2023 ini di Grobogan ada tiga Desa kategori miskin ekstrem.

Table 13 Rekapitulasi Desa Dampingan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten	Kecamatan	Desa
Badan Kesbangpo 1	Grobogan	Gubug	Mlilir
Biro Kesra	Grobogan	Ngaringan	Bandungsari
Dinas Pusdataru	Grobogan	Ngaringan	Belor

Sumber: Dokumen dari SiLap Online (Terlampir)

Adanya penggeseran tersebut tidak lain karena keputusan Kepala Desa mengambil dana 23% dari presentase dana yang diberikan pemerintah pusat 10-25%. Banyaknya dana yang diambil tersebut kemudian pemerintah pusat menetapkan bahwa Desa Mlilir masuk dalam kategori miskin ekstrem.

”Desa Mlilir ini terpilih untuk dilakukannya Program Desa Dampingan karena masuk dalam kategori miskin

ekstrem dan untuk levelnya kita sendiri tidak tahu mbak karena tidak adanya ukuran untuk menilai. Desa Mlilir ini dilakukannya Program Desa Dampungan karena dana desa lebih dari 10-25%. Kemudian Desa mengambil 23%. Dengan adanya itu pihak yang diatas menganggap bahwa Desa Mlilir kategori miskin ekstrem.” (Wawancara Bapak Mohammad Khambali, 12 Februari 2024).

Kutipan wawancara diatas menjawab alasan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mlilir dalam mengambil dana desa 23% akibat dari adanya covid, keputusan Kepala Desa tersebut menjadikan pemerintatuh pusat menilai bahwa Desa Mlilir masuk dalam kategori level kemiskinan ekstrem. Keputusan yang diambil oleh Kepala Desa yakni demi kesejahteraan rakyat karena pada saat terjadinya covid banyak masyarakat yang ekonominya menurun.

Selain adanya keputusan kepala desa keputusan Badan Kesbangpol turut andil dalam program desa dampungan, dengan adanya penggeseran dan ditetapkannya desa mlilir sebagai desa miskin ekstrem, kemudian Badan Kesbangpol melihat kondisi desa tersebut dari hal tersebut, Badan Kesbangpol memverifikasi bahwa target lokasi di Desa Mlilir tepat untuk dilakukan pendampungan. Karena adanya dua keputusan tersebut maka Desa Mlilir menjadi lokasi dilaksanakannya program desa dampungan. Setelah ditentukan target lokasi kemudian Badan Kesbangpol melakukan *assessment*, proses tersebut melibatkan peran aktif masyarakat dalam penentuan sasaran penerima, melibatkan masyarakat kemudian didapat hasil keputusan bersama sasaran penerima yang tepat untuk dilakukan intervensi bantuan.

Kesimpulan dari peneliti berdasarkan data yang sudah dihimpun, mengenai letak pengambilan keputusan sudah terpenuhi. Keberhasilan penentuan lokasi Desa Mlilir karena adanya letak pengambilan keputusan dari para elit dan melibatkan partisipasi masyarakat. Indikator ini dapat dikatakan terpenuhi karena sudah sesuai dan dijalankan atas dasar kepentingan bersama.

e. Pelaksanaan Program (*Program Implementer*)

Indikator ini berartian bahwa aktor memiliki peran penting demi keberhasilan suatu program keberhasilan program aktor yang dibutuhkan harus kompeten serta harus terdata apakah kebijakan menyebutkan implementatornya secara terperinci,

suatu program dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak pihak. Pelaksana Program Desa Dampingan ialah seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur sebagai Pembina, Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, Pemerintah Kabupaten melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Desa karena pelaksanaan Program Desa Dampingan secara teknis dilakukan di Desa tentunya melibatkan Pemerintah Desa tugasnya menjadi fasilitator, pengertian fasilitator ialah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dan mitra pelaksana melalui TJSLP/CSR (Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/*Corporate Social Responsibility*) yang menjadi donasi pelaksanaan Program Desa Dampingan.

Pelaksanaan Program Desa Dampingan di tiap Desa memiliki 1 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai pihak yang melakukan pendampingan serta intervensi bantuan, OPD yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan adalah Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Tahapan pelaksanaan sebelum proses implementasi sudah dijelaskan pada bagan proses implementasi poin A.1 penyusunan agenda. Dalam bagan tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah melakukan *Assessment*, merupakan penilaian untuk mendapatkan serangkaian informasi hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi riil desa, dalam proses *assessment* Badan Kesbangpol dibantu oleh Pemerintah Desa Mlilir karena Pemerintah Desa Mlilir memiliki tugas sebagai fasilitator Badan Kesbangpol dalam mencari informasi. Proses *assessment* dilakukan dengan *Scanning* cepat hasil *scanning* tersebut kemudian dikomunikasikan dengan Pemerintah Desa Mlilir sehingga didapatkan data calon penerima bantuan. Hasil *scanning* yang di dapatkan adalah 18 penerima bantuan jamban, penerima bantuan sembako dari Bank Mayapada sejumlah 50, penerima bantuan modal usaha dari Bank BKK Gubug sejumlah 10 penerima, penyaluran bibit dari kesbangpol sejumlah 300 bibit jambu air sebagai pemberdayaan diharapkan kedepannya mampu mengembangkan ekonomi desa, bantuan RTLH sejumlah 10 penerima, dan bantuan yang bersumber dari Baznas sebanyak 30 penerima (Terlampir).

“Dalam pelaksanaan program Desa Dampingan, pemerintah desa yang menjadi fasilitator Badan Kesbangpol berperan aktif dalam membantu pelaksanaan

Program Desa Dampingan, kami membantu dalam proses perencanaan program dengan mengidentifikasi kebutuhan maupun tantangan ditingkat desa, selain itu kami juga memastikan bahwa semua kegiatan Program Desa Dampingan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan” (Wawancara Kepala Desa Mlilir, Bapak Mohammad Khambali, 12 Februari 2024).

Data yang sudah dihimpun diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor keberhasilan Program Desa Dampingan dari peran para aktor adalah antara Badan Kesbangpol dengan Pemerintah Desa memiliki komunikasi yang baik, hasil komunikasi yang baik kemudian dapat terciptanya koordinasi baik hal ini yang menjadi keberhasilan dalam Program Desa Dampingan. Adapun pelaksanaan Program Desa Dampingan adalah sebagai berikut:

Table 14 Laporan Kegiatan Desa Dampingan

Tahun Mulai Pendampingan	Kegiatan Yang Sudah Terlaksana	Tindak Lanjut
Januari 2023	Rakor Penanggulangan kemiskinan ekstrem dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah disertai pemberian bantuan jamban oleh Gubernur dan Kesbangpol sejumlah 18 unit	Percepatan pelaksanaan pembangunan bantuan jamban kepada warga dengan pekerja warga setempat
Februari 2023	Padat karya pembangunan bantuan jamban	Program bantuan jamban agar

	sudah dilaksanakan	dimanfaatkan dan dirawat sebagaimana mestinya
Februari 2023	Verifikasi dan validasi data dengan mendatangi satu per satu warga yang masuk dalam pendataan oleh Perangkat Desa didampingi oleh Kesbangpol	Rekapitulasi data warga miskin ekstrem dengan beberapa indicator
Februari 2023	Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan jamban	Melakukan pengajuan ulang terhadap 10 calon penerima bantuan jamban berkoordinasi dengan Biro Kesra dan Baznaz
Maret 2023	FGD pembentukan yayasan sosial untuk mengatasi kemiskinan	Pembentukan dan pendaftaran secara legal yayasan sosial untuk

		mengatasi kemiskinan
April 2023	Pembagian bantuan langsung tunai	Pembagian bantuan terhadap keluarga yang tergolong miskin ekstrem sebanyak 30 orang
April 2023	Telah dilaksanakan penerimaan bantuan jamban sebanyak 10 unit CSR dari Baznas	Pembangunan jamban sebanyak 10 unit CSR dan Baznas
April 2023	Penyaluran bantuan CSR Bank Mayapada	Penyaluran Bantuan CSR Bank Mayapada
Mei 2023	Expo Desa Dampungan	Mengikuti Expo Desa Dampungan
Mei 2023	Melakukan pembangunan jamban untuk 8 unit kerja sama dengan Kagama	Pembangunan Jambanissi
Juni 2023	Pembangunan 8 jamban dengan	Pembangunan sudah terlaksana

	pembiayaan 20 Juta	
Juli 2023	Pembangunan 28 unit kamar mandi	Pembangunan sudah dilaksanakan
Juli 2023	Pembangunan Pamsimas (hasil koordinasi dan komunikasi Kepala Desa dengan DPR RI	Pembangunan Pamsimas berupa tower, pengeboran sumur, perpipaan dan pemasangan sambungan rumah sebanyak 160 titik
Agustus 2023	Penyerahan bibit jambu air kepada warga masyarakat Desa Mlilir untuk segera ditanaman sekaligus dirawat	Setelah disalurkan dan ditanam rencana kedepan hasil dari buah jambu ini akan di Kelola oleh Bumdes
Oktober 2023	Pembangunan rumah layak huni fasilitasi oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Pembangunan 10 RTLH Fasilitasi Disperakim bersumber dari APBD

		Provinsi Jawa Tengah
Oktober 2023	Pembentukan yayasan sosial pengentasan kemiskinan sekaligus sebagai penampung sumbangan guna dibagikan kepada warga yang membutuhkan	Akan ada stimulasi bantuan secara berkelanjutan dari Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumen Bakesbanpol Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023

Tabel diatas merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol, tercapainya kegiatan tersebut karena peran aktif dari pelaksana kegiatan yang saling melakukan koordinasi dengan baik, keberhasilan pelaksanaan Program Desa Dampingan tidak hanya disebabkan oleh faktor komunikasi yang baik dari aktor-aktor yang terlibat. Faktor keberhasilan dapat ditentukan oleh pencapaian target dalam pelaksanaan Program Desa Dampingan, Adapun capaian target dalam pelaksanaan Program Desa Dampingan adalah sudah dilaksanakannya kegiatan pembagian uang dan sembako, RTLH, Jambanisasi, pemberdayaan dengan memberikan bibit jambu air, bantuan modal usaha serta pelatihan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Gambar 3 Pelaksanaan Bantuan RTLH



Sumber: Dokumen Desa Mlilir

Gambar 4 Pelaksanaan Jambanisasi



Sumber: Dokumen Desa Mlilir

Gambar 5 Terlaksananya pemberian bantuan sembako



Sumber: Dokumen Desa Mlilir

Pelaksanaan Program Desa Dampingan cukup berjalan baik karena komunikasi dari pihak Badan Kesbangpol dengan Pemerintah Desa Mlilir yang dilakukan secara intens hingga terciptanya koordinasi dengan baik membuat

program ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan, sehingga program ini bisa mencapai target yang sudah direncanakan.

f. Sumber daya yang dikomitmen (*Ressource Committed*)

Indikator ini berarti bahwa dalam membuat kebijakan ataupun program selalu melibatkan sumber daya, adanya program tersebut kemudian akan membawa manfaat secara fisik maupun non-fisik (Wachidah & dkk, 2022).

Sumber daya merupakan faktor pertimbangan dalam analisis institusi sebab ketersediaan maupun pengelolaan sumber daya dapat berpengaruh pada kinerja. Mengelola sumber daya secara efektif Lembaga dapat meningkatkan hasil kerja dan dapat mencapai tujuan serta memberikan layanan yang prima. Dalam Program Desa Dampungan yang menjadi faktor keberhasilan terletak pada ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peran penting karena mereka membawa ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Sumber daya yang terlatih cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka.

Pelaksana Program Desa Dampungan di Desa Mlilir ialah Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tepatnya Bidang Politik dalam Negeri yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampungan, verifikasi, intervensi, serta pemantauan. Tugas yang diberikan tersebut relevan dengan tugas dan fungsi pokok Bidang Politik dalam negeri yaitu memverifikasi, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan, salah satu faktor keberhasilan program ini karena tenaga ahli yang ditugaskan sudah sesuai dengan bidangnya, mereka melaksanakan tugas dengan standar tinggi hingga menghasilkan ide-ide inovatif yang memungkinkan program desa dampungan berhasil mencapai tujuannya. Untuk melihat bagaimana kinerja Badan Kesbangpol selama di lapangan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Ketua TPK Desa Mlilir.

“Melihat kinerja kesbangpol dalam pelaksanaan kegiatan ini mereka melakukan tugas serta fungsinya dengan baik yaitu melakukan *assessment* data, serta melakukan intervensi bantuan, faktor penunjang keberhasilan program desa dampungan selain dari Bakesbnagpol yang

sudah terlatih maupun berpengalaman dalam bidang ini, mereka juga melakukan kolaborasi melibatkan sector usaha untuk mendapatkan anggaran” (Wawancara Bapak Sugiyanto, 12 Februari 2024).

Faktor penunjang keberhasilan program desa dampingan selain adanya sumber daya manusia yang terlatih, tersedianya anggaran turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Dengan anggaran yang cukup program desa dampingan dapat memperoleh dan mengalokaasikan sumber daya yang diperlukan. Berikut adalah anggaran Program Desa Dampingn dan sumber dana yang didapat:

Table 15 Anggaran Program Desa Dampingan

Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Progress Capaian
Rp. 30.000.000	Baznas Provinsi	Dari 10 nama yang diajukan 8 sudah dilakukan intervensi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sehingga dilakukan pengajuan ulang
Rp. 7.500.000	Iuran jum'at berkah	Pembagian bantuan terhadap keluarga yang tergolong miskin ekstremsebanyak 30 orang
Rp. 30.000000	Baznas	Telah dilaksanakan penerimaan bantuan RTLH

		sebanyak 10 unit CSR dari Baznaz
Rp. 20.000.000	KAGAMA	Telah disalurkan bantuan jambanisasi
Rp. 20.000.000	KAGAMA	Telah dibangun bantuan jamban dari Kagama
Rp. 350.000.000	DPR RI	Pembangunan sudah dilaksanakan
Rp. 400.000.000	DPR RI	Sudah dilaksanakan pembangunan pamsimas berupa tower, pengeboran sumur, perpipaan dan pemasangan sambungan rumah sebanyak 160 titik
Rp. 200.000.000	APBD	Pembangunan 10 RTLH Fasilitasi Disperakim bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah
Rp. 0	0	Terbentuknya Yayasan sosial pengentasan kemiskinan Desa Mlilir mandiri

		terdaftar di Kemenkumham
--	--	-----------------------------

Sumber: Dokumen Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Tahun

2023

Kesimpulan dari data yang sudah dihimpun dalam indikator sumber daya yang dikomitmen adalah faktor penunjang keberhasilan Program Desa Dampingan terletak pada sumber daya manusia serta anggaran yang memadai, Sumberdaya anggaran yang diperoleh dalam program desa dampingan tidak hanya dari APBD tetapi keberhasilannya ditunjang karena melibatkan lembaga swasta sebagai kerjasama dalam keberhasilan program ini selain dalam anggaran kunci keberhasilan ada pada implementor yakni Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang terlatih dan relevan dalam bidang memiliki pemahaman yang baik tentang tugas serta tanggung jawab mereka, maka program desa dampingan berjalan lancar karena Badan Kesbangpol memiliki pengetahuan yang lebih luas mmengenai praktik pembinaan maupun verifikasi data serta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses kerja dan cara-cara untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat meningkatkan hasil program secara keseluruhan. Selain itu, Anggaran yang memadai turut menjadi faktor keberhasilan program desa dampingan dengan anggaran yang cukup, program desa dampingan daapat menyediakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat sasaran penerima bantuan.

B.2 Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*)

a. Kekuasaan, Peran aktor, dan kepentingan (*Power, Strategy of actor involved*)

Dalam program kebijakan ini tidak terlepas dari aktor yang ada di dalamnya, peran aktor ini kemudian memuat kepentingan yang digunakan sebagai strategi pelaksanaan dalam program maupun kebijakan (Wachidah & dkk, 2022). Program Desa Dampingan dijalankan atas kekuasaan dari Pemerintah Povinsi Jawa Tengah, termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan visi-misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dalam acara High Level Gathering pada 22 Juli 2022 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan keroyokan serta dalam

pelaksanaanya butuh ketekunan, ketelitian, dan kesabaran dari SKPD maupun stakeholder terkait agar program ini bisa berjalan optimal. Pernyataan diatas membuktikan jika Program Desa Dampingan sepenuhnya dipegang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun koordinasi program, kemudian program tersebut diturunkan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah sebagai implementator sesuai dengan tupoksinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum di tingkat nasional dan kemudian di implementasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dasar hukum utama yang mengatur tupoksi Badan Kesbangpol mencakup undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Permendagri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, dan Perda maupun Pergub.

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam Program Desa Dampingan memiliki tugas melakukan pendampingan dan mengintervensi bantuan dalam penanggulangan kemiskinan tepatnya di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Kepentingan dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Mlilir ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama pada desa-desa yang tertinggal atau dalam kondisi miskin ekstrem, strategis yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi serta kerjasama dengan perangkat desa, karena perangkat desa yang paling dekat maupun mengerti kondisi masyarakat setempat, Perangkat desa dalam Program Desa Dampingan memiliki tugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana kerja sesuai dengan kebutuhan desa, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, kolaborasi antar pihak diatas adalah upaya mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan survei yaitu menanyakan kembali kondisi ekonomi yang sedang dialami seperti aset yang dimiliki, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran setiap bulan, Rumah yang ditinggali milik pribadi atau tidak, kondisi kesehatan. Dilakukannya survei dengan tujuan agar bantuan yang diterima sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya dalam kondisi rumah tangga pekerjaan utamanya memiliki usaha, maka bantuan yang diberikan ialah bantuan modal usaha. Mengenai jenis-jenis bantuan

yang diterima peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku ketua TPK

“Dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Mlilir ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh kesbang kita atur lagi sesuai apa yang rumah tangga butuhkan, disini saya dan teman-teman melakukan assement pada rumah tangga penerima bantuan, dengan begitu bantuan yang tersalurkan untuk warga dapat dirasakan manfaatnya karena dalam Program ini kita adakan untuk kepentingan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, adanya program ini masyarakat terbantu akan pemenuhan kebutuhannya” (Wawancara Bapak Sugiyanto, 12 Februari 2024).

Dari wawancara diatas, menurutnya kepentingan yang dijalankan Program Desa Dampingan sesuai dengan kepentingan masyarakat, kepentingan itu berupa peningkatan kesejahteraan, dari adanya program tersebut masyarakat cukup terbantu atas pemberian bantuan. Kemudian wawancara dilakukan kepada salah satu masyarakat penerima bantuan mengenai indikator kepentingan dan strategi dari Program Desa Dampingan sebagai penguat pernyataan dilakukan untuk siapa program ini dan langkah strategis apa yang dilakukan.

“Adanya program bantuan ini saya cukup terbantu mbak, disini kan saya dapat bantuan modal usaha karena saya adalah petani jamur, dari modal usaha ini saya bisa memperbanyak pembelian bahan baku maka dari itu, saya sangat berterimakasih karena penambahan modal menjadikan bahan baku yang saya jual bisa lebih banyak sehingga pendapatan saya meningkat” (Wawancara Warga Ibu Darwati, 12 Februari 2024).

Wawancara responden pertama atas kepentingan program yang diberikan cukup terbantu karena kepentingan yang ada di dalam program tersebut untuk kepentingan masyarakat, kepentingan itu berupa prioritas kebutuhan yang tepat bagi penerima bantuan. Strategi dalam Program Desa Dampingan ini dirasa tepat bagi si penerima bantuan karena dari TPK (Tim Penanggulangan

Kemiskinan) melakukan survei ulang agar tepat sasaran. Wawancara Responden kedua mengutarakan mengenai kepentingan dari program bantuan ini sudah dapat dirasakan atau belum dirasakan.

“Kepentingan dari adanya Program Desa Dampingan ini saya sudah cukup terbantu dengan adanya bantuan pemberian uang dari pemerintah desa setempat juga sebelum memberikan bantuan mereka mendatangi rumah saya untuk menanyakan kondisi ekonomi saya. Tetapi, dengan adanya bantuan pemberian uang tapi saya sendiri merasa kurang mbak karena yang diberikan hanya tiga ratus ribu, sedangkan saya janda dan anak-anak punya banyak kebutuhan, mungkin kalau dari saya sendiri lebih baiknya diberikan bantuan untuk modal karena saya sendiri berjualan di SD” (Wawancara Warga Ibu Febri, 12 Februari 2024).

Berdasarkan wawancara diatas kepentingan dari adanya Program Desa Dampingan ini untuk masyarakat hal itu benar adanya dibuktikan dari survei yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Oleh karena itu, kepentingan yang dimaksud dalam indikator ini telah sesuai untuk kepentingan masyarakat, serta langkah strategis juga sudah diupayakan walaupun dari penerima bantuan tidak puas dari jenis bantuan yang diberikan.

Kesimpulan peneliti dari pengumpulan data yang sudah dihimpun, hasil analisis indikator kekuasaan, peran aktor, dan kepentingan menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol dan pemerintah desa setempat telah melakukan kebijakan Program Desa Dampingan dengan cukup baik. Kepentingan yang ada dalam indikator ini sudah dijalankan sesuai apa yang masyarakat inginkan, kepentingan yang termuat dalam indikator ini atas dasar kepentingan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi yang Badan Kesbangpol serta pemerintah desa setempat sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan melakukan assessment kepada calon penerima bantuan agar bantuan yang diterima tepat sasaran.

b. Karakteristik suatu Lembaga (*Institution an Rezime Characteristic*)

Indikator ini menjelaskan bahwa di perencanaan program harus melalui lebih dari satu pertimbangan. Menurut Merilee S. Grindle (1980) menjelaskan bahwa lingkungan kebijakan turut berpengaruh pada keberhasilan program. Indikator ini akan menjelaskan karakteristik Lembaga yang turut menjadi keberhasilannya. Dikutip dari Fauzan (2023) dalam Robins (2004) bahwa kelembagaan adalah tempat perkumpulan melibatkan dua orang, di dalamnya berisi orang-orang yang berkompetisi untuk melakukan tugas ataupun kerjasama demi mewujudkan kepentingan dalam sebuah organisasi. Penelitian ini akan meneliti karakter lembaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui tugas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Desa Dampungan.

Kebijakan dalam Program Desa Dampungan melibatkan banyak stakeholder. Program Desa Dampungan ini dirancang untuk menjadi sebuah inisiatif yang holistik dan terintegrasi sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa, serta mengurangi kesenjangan sosial maupun ekonomi antara desa dengan perkotaan. Dalam pelaksanaannya Program Desa Dampungan melibatkan masyarakat.

Semua yang terlibat dalam pelaksanaan Program Desa Dampungan baik dari masyarakat dan stakeholder terkait sudah direncanakan dalam RPJMD Jawa Tengah pada lima tahun kedepan yakni 2018-2023. Sesuai dengan apa yang ada dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dibentuklah program 1 OPD minimal satu Desa. OPD atau implementor yang ada dalam Program Desa Dampungan ini adalah Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dalam melakukan pendampingan, intervensi bantuan, pemantauan dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di dalam pelaksanaannya hal ini sesuai pada saat program ini diluncurkan oleh Ganjar Pranowo dalam acara *High Level Gathering* ia mengatakan bahwa dalam percepatan kemiskinan agar SKPD dan seluruh stakeholder bersama-sama mengoptimalkan potensi desa (Jatengprov, 2019).

Membuktikan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa terkait arahan Gubernur Jawa Tengah dalam percepatan kemiskinan yang sebelumnya penulis sudah jelaskan kepada Kepala Desa terkait arahan Gubernur tersebut, ia mengatakan bahwa Badan Kesbangpol memang sudah semestinya menjalankan tugas yang diberikan.

“Mengenai apa yang mbak jelaskan bahwasannya kesbangpol di desa sudah melakukan tugasnya dengan baik terbukti mereka melakukan pendampingan maupun intervensi bantuan, pak gubernur waktu itu datang ke desa dalam rangka diadakannya rakor ia juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program desa dampingan ini perlu adanya keroyokan dari para SKPD agar kemiskinan segera dituntaskan” (Wawancara Bapak Mohammad Khambali, 12 Februari 2024).

Kutipan wawancara diatas bahwa Badan Kesbangpol sudah menjalankan tugasnya sesuai dari fungsi maupun arahan dari Gubernur Jawa Tengah yaitu dengan melakukan pendampingan kepada perangkat desa setempat serta melakukan intervensi bantuan, dengan adanya tujuan tersebut dapat menjadi kunci serta keberhasilan Badan Kesbangpol dalam membantu percepatan penanggulangan kemiskinan. Lembaga tersebut memiliki kualitas yang baik dalam melakukan tugasnya dengan tepat dan cepat, Badan Kesbangpol juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, keputusan yang disepakati bersama menjadi kunci keberhasilan program karena lembaga yang bersifat demokratis seringkali mendorong partisipasi aktif masyarakat, partisipasi ini memungkinkan program lebih sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan masyarakat. Penguat pernyataan diatas ialah ditemukannya pernyataan dari salah satu Ketua RT Bapak Darto, Ia memutuskan bahwa Badan Kesbangpol merupakan lembaga yang demokratis karena mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, bentuk partisipasi tersebut ialah dilaksanakannya FGD, dalam FGD tersebut masyarakat menyuarakan verifikasi data hal tersebut menjadikan Badan Kesbangpol terbantu dan percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara cepat, kunci keberhasilan dari Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan dikarenakan peran masyarakat yang responsif, masyarakat merespon akan kebutuhan untuk pemenuhan pelaksanaan.

Kesimpulan peneliti berdasarkan data yang sudah dihimpun adalah analisis Karakteristik suatu Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bersifat koordinatif dan pembinaan, koordinatif disini berarti bahwa Badan Kesbangpol memiliki peran utama dalam melakukan koordinasi, mereka memastikan sinergi antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat. Dalam

pembinaan Badan Kesbangpol berfokus pada pembinaan dan pendampingan terhadap berbagai pihak, termasuk pihak swasta maupun masyarakat. Mereka membantu memperkuat kapasitas serta kualitas lembaga tersebut serta memberikan bimbingan dalam mengatasi tantangan. Pelaksanaan Program Desa Dampungan dalam melihat karakteristik sepak terjang Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dalam salah satu programnya untuk mengentaskan kemiskinan ialah ia berfokus pada pembangunan infrastruktur desa di Provinsi Jawa Tengah, beliau sangat memahami serta responsif atas persoalan yang terjadi di desa dengan mengerahkan seluruh stakeholder untuk melakukan pengeroyokan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, sesuai dari tujuan awal visi-misinya beliau memprioritaskan pembangunan yang ada di desa. Capaian pada rehabilitasi RTLH tahun 2013 sebanyak 1.682.000 unit, di tahun 2023 mengalami penurunan 640.388 hingga jumlah RTLH tahun 2023 ialah 1.041.894 unit. Pencapaian tersebut tidak lepas dari gotong royong seluruh stakeholder terkait, dalam pembangunan desa.

c. Daya tanggap dan kepatuhan (*Compliance and Responsive*)

Daya tanggap dan kepatuhan ini memiliki dua artian dalam Program Desa Dampungan, daya tanggap disini berarti sejauh mana implementor dalam mengetahui jobdesk yang diberikan. Program desa dampungan ini memiliki daya tanggap dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dibentuklah Satgas kemiskinan yang secara fungsional merupakan fungsi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) ini dibuat untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan terlaksana terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah, pelayanan, dan pelaporan oleh pihak-pihak pelaksana. Daya tanggap selanjutnya dijelaskan pada rakor yang dilaksanakan di Desa Mlilir pada 25 Januari 2023, menyampaikan bahwa beliau mendorong jika ada level desa miskin maupun ditemukannya desa dengan level kemiskinan ekstrem bantuannya untuk segera digeser ke desa tersebut (Antara, 2023).

Penuturan diatas selanjutnya Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada 99 perwakilan Kepala Desa Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak ia menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem yang ada di Desa masing-masing menjadi tanggung jawab setiap Kepala Desa, Ganjar juga meminta agar Kepala Desa dalam satu minggu ini untuk mendata masyarakatnya yang akan diberikan

bantuan, camat-camat menyupervisi kemudian dikompilasi di Kabupaten. Dari apa yang disampaikan Ganjar bahwa arahan tersebut diberikan sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan.

Disebutkan diatas Kepala Desa memiliki peran dan tanggung jawab dalam pendataan desa, peneliti kemudian melakukan wawancara pada Kepala Desa terkait bagaimana pendataan data tersebut.

“Kenapa Kepala Desa menjadi pemegang utama pendataan tersebut yak arena Kepala Desa memiliki wewenang di Desa mbak, terkait Program Desa Dampingan ini sebelum kesbangpol melakukan pendampingan kesini, saya diarahkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan dibantu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Itu merupakan daya tanggap dari pemerintah desa terkait arahan kesbangpol maupun pemprov” (Wawancara Bapak Mohammad Khambali, 12 Februari 2024).

Disebutkan bahwa yang menjadi daya tanggap dan kepatuhan dari pemerintah desa ialah dengan adanya arahan dari Gubenrnur dan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, arahan yang diberikan tersebut kemudian pemerintah desa dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) segera mempercepat penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan percepatan pendataan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan atas arahan diatas tersebut Bapak Sugiyanto beserta tim nya kemudian melakukan percepatan dengan mengadakan musyawarah antar RT/RW dilakukannya musyawarah ini untuk mendapatkan data-data kartu keluarga yang perlu mendapatkan bantuan. Untuk memastikan bahwa hal tersebut benar atau tidak kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Darto selaku ketua RT 03 RW 06.

“Program Bantuan ini sebelumnya saya sudah tahu mbak, dari desa sendiri memang sudah menyuruh ketua RT dan RW untuk musyawarah terkait siapa saja yang berhak dan tepat untuk menerima bantuan. Dan saya sendiri yang mendata. Kami sebagai masyarakat turut berpartisipasi dalam melakukan pendataan karena untuk kondisi ekonomi per rumah tangga dari perangkat desa kan kurang tahu, pemberian bantuan yang saya lihat juga termasuk

cepat mbak dari bantuan renovasi rumah pun berjalan dua minggu” (Wawancara Warga Bapak Darto, 12 Februari 2024).

Menurutnya mengenai daya tanggap yang dilakukan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan ini sudah dilakukan dengan baik hal itu dibuktikan dari pemerintah desa yang memberikan arahan kepada ketua RT dan Rw setempat untuk segera mendata warganya. Indikator kepatuhan yang dimaksud dterletak pada RPJMD Jawa Tengah yakni keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk melibatkan masyarakat utamanya pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar. Responden selanjutnya memberikan argument mengenai indikator daya tanggap serta kepatuhan program ini;

“Daya tanggap dari Program Desa Dampingan ini ya kalau saya lihat cukup baik ya mbak karena saya melihat setiap bulannya pasti ada kegiatan saya sering melihat kalau rumah rumah warga sudah pada direnovasi dan itu cepat sekali tidak ada satu bulanan, terus ada pembagian bibit jambu air sekarang kan sudah pada di tanam itu yang paling kelihatan di lapangan. Mengenai peran serta masyarakat dalam program ya saya mengikuti sosialisasi dari pemerintah desa tersebut dalam sosialisasi itu diberikan pengetahuan akan pemberdayaan desa” (Wawancara Warga Ibu Febi, 12 Februari 2024)

Dikutip dari wawancara diatas daya tanggap yang dilihat oleh salah satu penerima bantuan adalah perepatan dalam pemberian bantuan setiap bulannya selalu ada kegiatan pemberian bantuan bisa dilihat dari pembangunan RTLH berjalan cepat, dan percepatan yang lain dilihat dari pemeberian bibit jambu air yang sudah ditanam di Lapangan Desa Mlilir, kepatuhan dari salah satu warga tersebut adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan pemerintah desa.

BAB V

DAMPAK PROGRAM DESA DAMPINGAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MLILIR, KECAMATAN GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN

Program Desa Dampingan yang di implementasikan di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, yang diberikan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Melalui program ini, masyarakat Desa Mlilir telah merasakan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu dampak positif yang paling terlihat adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, banyak warga Desa Mlilir yang berhasil memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di desa, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, program ini juga telah berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur di Desa Mlilir. Selain itu, program ini juga telah memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara warga Desa Mlilir. Melalui kerjasama dalam pelaksanaan program dan partisipasi dalam kegiatan bersama, masyarakat desa telah menjadi lebih terorganisir dan saling mendukung satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif, di mana setiap anggota masyarakat merasa didukung dan dihargai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program desa dampingan di Desa Mlilir telah membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, dan ikatan sosial di desa tersebut.

Pemberian modal, jambanisasi, renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pemberian bibit buah, dan bantuan pada keluarga miskin ekstrim telah memberikan bantuan yang signifikan bagi masyarakat. Melalui pemberian modal, banyak warga dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru di desa. Jambanisasi dan renovasi RTLH memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sanitasi dan kualitas hunian, mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemberian bibit buah memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan sumber pendapatan melalui pertanian atau kebun buah, serta memberikan akses kepada makanan bergizi yang lebih baik. Sementara itu, bantuan pada keluarga miskin ekstrim membantu menyediakan perlindungan sosial dan dasar-dasar kehidupan kepada mereka yang paling rentan di masyarakat. Secara keseluruhan, kombinasi berbagai program bantuan ini telah membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi masyarakat. Ini tidak hanya memberikan dampak positif langsung bagi individu dan keluarga, tetapi juga untuk keseluruhan desa dengan menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera, berkelanjutan, dan inklusif.

1. Peningkatan Kreativitas Masyarakat

Program Desa Dampingan sering kali memberikan bantuan atau pelatihan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan serta mengembangkan kreativitas masyarakat dalam berwirausaha. Program bantuan desa untuk meningkatkan pendapatan biasanya dirancang dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, khususnya mereka yang berada di sektor ekonomi yang kurang berkembang. Melalui program ini masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru, akses modal usaha maupun dukungan dalam pengembangan usaha rumahan. Responden pertama berpendapat dampak yang di dapat dari adanya pemberian bantuan modal usaha.

“Dari adanya bantuan pemberian modal ini saya cukup terbantu sih mbak dari bantuan yang diberikan Rp. 2.500.000 itu saya gunakan untuk kumbung jamur meskipun nominal segitu masih kurang tapi lumayanlah mbak untuk tambah-tambah. Kalau untuk pemberian bantuannya sendiri saya baru diberikan satu kali dari 2014 saya budidaya jamur baru 2023 ini saya mendapatkan bantuan, jadi dampaknya belum terlalu kelihatan mbak, pertama kali budidaya ini saya coba 500 baeklot jamur itu satu baglognya seharga RP. 1.500 jadi saya ambil 500 baglog saya dapet uang Rp. 1.900.00 itu kalau dulu modalnya kecil nah keuntungan tersebut saya buat untuk tambah tambah pembelian baglog, pemberian bantuan tersebut ya kalau disaya paling untuk tambahan lagi sehingga keuntungan yang saya dapatkan lumayan, saya mengucapkan

terimakasih karna dari bantuan tersebut perekonomian saya meningkat” (Wawancara penerima bantuan modal usaha Ibu Darwati, 12 Februari 2024).

Menurutnya dalam bantuan pemberian modal yang diberikan responden cukup terbantu, pemberian bantuan modal usaha digunakan untuk membeli media tanam lagi karena semakin banyak membeli media tanam semakin banyak juga pendapatan yang diterima. Pemberian modal usaha menjadikan masyarakat mengembangkan usaha yang lebih baik lagi kedepannya.

Dalam teorinya, Merilee S. Grindle menguraikan bahwa dalam pembentukan sebuah kebijakan tentunya harus memperhatikan *content of policy* guna mampu memberikan dampak dan hasil yang sesuai dengan tujuan awal. Grindle dalam *content of policy* menyampaikan bahwa sebuah kebijakan haruslah memiliki manfaat dan mampu memberikan perubahan pada objek kebijakannya. Manfaat yang dimaksud adalah bentuk positif yang diterima oleh masyarakat, dalam konteks Program Desa Dampungan di Desa Mlilir dapat ditemukan bahwa program tersebut membuahkan hasil yang sangat positif bagi masyarakat Desa Mlilir Kabupaten Grobogan. Melalui bantuan pemberian modal bagi masyarakat dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha nya agar tetap berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemberian modal dan sembako pada manifestasinya memberikan dampak yang sangat positif. Beberapa warga di antaranya mampu memulai kembali dan mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan ini, warga mampu membangun usaha mereka sendiri tanpa selalu bergantung pada bantuan sosial lainnya terutama ketergantungan terhadap pemerintah.

Memberikan bantuan modal usaha pada pelaku usaha dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di tingkat desa. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan aktivitas ekonomi desa. Menggerakkan ekonomi usaha kecil dan menengah desa diatas sudah dijelaskan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diberikan bantuan modal dalam bentuk uang tetapi bisa diberikan bentuk yang lain. Program Desa Dampungan sesuai pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dalam mengembangkan ekonomi lokal. Ekonomi lokal merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada aktivitas ekonomi yang terjadi di tingkat lokal, seperti di suatu kota, kabupaten, atau wilayah tertentu. Ekonomi

lokal melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah tersebut (Yusri, 2023). Aktivitas ekonomi lokal mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa.

Dalam ekonomi lokal, terjadi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di wilayah tersebut, termasuk produsen, pedagang, konsumen, dan pemerintah daerah. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, budaya, dan kebijakan lokal mempengaruhi dinamika ekonomi lokal. Ekonomi lokal sering kali dilihat sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, ekonomi lokal juga memiliki potensi untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi suatu daerah, mempromosikan keragaman ekonomi, dan memperkuat ikatan sosial antarwarga di dalam komunitas lokal.

Ekonomi lokal yang dikembangkan oleh Program Desa Dampingan ialah dengan pelatihan wirausaha dan pemberian bibit jambu air, pemberian bibit jambu air sebanyak 300 bibit ini dibagikan ke warga yang memiliki kriteria memiliki halaman rumah, selain itu pemerintah desa juga diberikan bibit diharapkan adanya pemberian bibit jambu air masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik sehingga dapat memiliki nilai jual dan oleh pemerintah desa hasil pemanfaatan jambu air ini akan masuk ke Bumdes. Kepala Desa Mlilir berpendapat bahwa diberikannya bantuan bibit ini sebelumnya sudah melakukan koordinasi terkait pemberdayaan apa yang cocok dilakukan di Desa Mlilir.

“Demi mewujudkan cita-cita pembangunan Jawa Tengah di tahun 2023 ini pemerintah provinsi ingin kemiskinan segera ditangani, dalam penanganan tersebut sesuai dengan visi-misi yakni peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan pemprov ingin mengembangkan ekonomi lokal agar tidak bergantung pada ekonomi luar, dari hal tersebut kemudian ada pemberdayaan jambu air karena dirasa dengan kondisi tanah yang ada Desa Mlilir tepat untuk ditanami Jambu air kemudian diharapkan jika pemberdayaan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menerima bantuan kemudian

kedepannya jika berhasil bisa dijual” (Wawancara Bapak Mohammad Khambali, 28 Februari 2024).

Kepala Desa mengatakan bahwa pemberian bibit jambu air ini diharapkan kedepannya masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, pemberian bibit jambu air sesuai dari visi-misi pembangunan Jawa Tengah mengenai mengembangkan ekonomi lokal yang diharapkan masyarakat dapat mengembangkan bibit jambu air tersebut yang kedepannya dapat diberdayakan dan menjadi nilai jual sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Gambar 6 sebelum pemberian bibit jambu air



Sumber: Dokumentasi Pribadi Kepala Desa, Tahun 2022

Gambar 7 Sesudah Pemberian Bibit Jambu air



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 12 Februari 2024

Responden kedua berpendapat mengenai dampak yang dirasakan adanya pemberian bantuan bibit ia mengatakan bahwa terkait pemberian bantuan jambu air belum dirasakan manfaatnya.

“Mengenai pemberian bibit jambu air itu sebelumnya tidak langsung diberikan melainkan ada sosialisasi terkait pemberdayaan jambu air, kalau menurut saya melihat kondisi tanah dan suhu di Desa Mlilir ini memang cocok untuk ditanami jambu air, menurut saya mengenai pemberdayaan jambu air ini sudah bagus ya mbak sekarang saja sudah kelihatan pohonnya sudah pada besar dan subur disini diperkirakan dapat berbuah habis lebaran mungkin. Kalau untuk manfaat yang didapat saya belum merasakan karena pemberian bibit ini dikasihnya bulan agustus paling perbedaannya sekarang sudah besar dan subur selain itu saya juga dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan jambu air” (Wawancara Warga Ibu Febi, 12 Februari 2024).

Kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa pemberian bibit jambu air dari Badan Kesbangpol sudah tepat karena melihat kondisi tanah di Desa Mlilir sangat cocok untuk ditanami jambu air, dari adanya pemberian bibit jambu air ini manfaat yang dirasakan masyarakat ialah dapat melakukan pemberdayaan secara mandiri sehingga kedepannya dapat menjadi usaha tambahan dan dapat memiliki nilai jual.

Penggerakan ekonomi lokal dengan peningkatan ketrampilan dan pendidikan yaitu diadakannya ketrampilan pelatihan pembuatan kue, pelatihan ini mengirim tiga perwakilan dari desa, dengan tujuan pemilik usaha kue dapat mengembangkan usahanya.

“Dampak dari adanya program desa dampingan ini ya sebagai menggerakkan ekonomi local, penggerakan ekonomi lokal tidak hanya memberikan bantuan modal tetapi mengembangkan usaha dari masyarakat agar lebih maju, nah dari situ diadakan ketrampilan karena di desa ibu-ibu yang punya usaha rumahan itu banyak mbak tetapi hanya menerima pesanan saja. Dari situ kesbang memberikan ketrampilan kepada ibu-ibu agar usahanya berkembang lagi sehingga dapat dijual keluar desa” (Wawancara Bapak Abdul Latif, 17 April 2024).

Kutipan wawancara diatas mengatakan bahwa dalam menggerakkan ekonomi lokal Badan Kesbangpol memberikan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat yang memiliki usaha rumahan. Kebanyakan di Desa Mlilir sendiri yang menjadi permasalahan adalah masyarakatnya kurang dalam mengembangkan usaha terutama dibidang usaha kue rumahan maka dari itu pelatihan ketrampilan membuat kue diadakan agar usaha kue rumahan dapat dijual tidak hanya di Desa Mlilir saja tetapi bisa dijual diluar Desa Mlilir. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pemilik usaha kue rumahan dengan menanyakan apa dampak dari adanya pelatihan tersebut.

“Mengenai dampak yang saya rasakan dari adanya pelatihan itu ya paling cuman bisa belajar membuat kue kue modern yang lagi viral itu croissant terus yang dari pelatihan itu saya juga mendapat banyak ilmu terkait pembuatan kue kue yang banyak diminati, tapi kan kalau kue kue yang kaya croissant begitu kan kalau di desa ga laku ya mbak soalnya kalau dijual pun harganya mahal jadi banyak yang tidak minat jadi paling saya hanya membuat kue kue manis kaya kue tart kue bolu kalau ga brownis karena kue kue itu banyak yang pesan. Berbicara dampak adanya pelatihan itu ya paling saya bisa mengenal teknik-teknik baru dalam pembuatan kue sama bisa belajar sama temen-temen yang usahanya udah besar gitu saya belajar cara mengembangkannya bagaimana, kalau untuk peningkatan pendapatan dari pelatihan tersebut ya belum ada mbak soalnya kan baru pelatihan pelatihan aja di bulan agustus jadi dampak yang saya rasakan yang paling signifikan cuman bisa belajar hal baru” (Wawancara Warga Ibu Sumarti, 17 April 2024).

Responden mengatakan bahwa dari adanya pelatihan ini ia mampu belajar hal baru mengenai jenis-jenis kue dari pelatihan yang diberikan responden bisa mengenal kue-kue modern yang belum pernah ia buat dan dari adanya pelatihan tersebut responden merasakan dampak menambah relasi dengan teman-teman dari daerah lain yang usahanya sudah maju dan berkembang, meskipun pelatihan dari pembuatan kue-kue modrn belum diterapkan tetapi responden

merasa ia dapat belajar hal baru yang kedepannya bisa menambah jenis pesanan kue. Peningkatan kreativitas dalam mengembangkan usaha pada Program Desa Dampingan dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mengembangkan usaha yang dimiliki, salah satu cara agar masyarakat berkembang yaitu dengan memberikan berbagai pelatihan, pelatihan yang diberikan oleh Program Desa Dampingan yakni pelatihan dalam pembuatan kue. Pelatihan ini diberikan agar pelaku usaha khususnya usaha rumahan kue agar termotivasi mengembangkan produk serta meningkatkan produk yang lebih berkualitas.

2. Kebiasaan Masyarakat lebih sehat

Program Desa Dampingan di dalamnya memberikan bantuan seperti RTLH dan jambanisasi, dua inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kondisi hunian. Manfaat bantuan ini diberikan kepada masyarakat sebagai peningkatan kesehatan, keamanan, serta kenyamanan. Program perbaikan kondisi rumah dapat mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk selain itu sanitasi yang lebih memadai dapat mencegah penyebaran penyakit. Masyarakat Desa Mlilir yang tidak memiliki sanitasi dirumahnya memiliki kebiasaan yang buruk yakni buang air besar di tempat terbuka yaitu di belakang rumah, ladang, serta sungai, untuk menghilangkan kebiasaan tersebut program sanitasi ini diberikan.

Gambar 8 Sebelum Jambanisasi dan air bersih



Sumber: Dokumen Desa Mlilir. Januari 2023

Gambar 9 Sesudah Jambanisasi dan air bersih



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 12 Februari 2024

Gambar 10 Sebelum Pembangunan Jamban



Sumber: Dokumen Desa Mlilir, Februari 2023

Gambar 11 Sesudah Pembangunan Jamban



Sumber: Dokumen Desa Mlilir, Februari 2023

Responden pertama menyatakan bahwa dalam pemberian bantuan ini ia sangat berterimakasih karena dengan adanya pembenahan ini membantu dalam meringankan beban pengeluaran.

“Saya mengucapkan banyak terimakasih dengan adanya program ini, program ini sangat bermanfaat bagi saya karena dapat mengurangi beban pengeluaran selain itu, dengan adanya bantuan jamban saya menjadi lebih nyaman dan sehat tanpa harus khawatir tentang resiko penyakit dan dengan adanya bantuan jamban ini juga membantu mengurangi pencemaran kungkungan” (Wawancara Warga, Bapak Darto 12 Februari 2024).

Responden mengucapkan banyak terimakasih atas pemberian bantuan jamban dalam Program Desa Dampungan adanya perbaikan sanitasi ini bukan hanya memberikan manfaat mengurangi beban pengeluaran melainkan dengan adanya program ini responden tidak perlu khawatir lagi soal kondisi Kesehatan maupun pencemaran lingkungan.

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai dampak adanya jambanisasi adalah masyarakat bisa mengurangi beban pengeluaran Kesehatan dengan mengurangi resiko penyakit terkait sanitasi yang buruk, masyarakat desa juga dapat mengurangi pengeluaran mereka untuk biaya perawatan Kesehatan. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat desa dengan membebaskan sumber daya untuk digunakan dalam hal-hal lain yang lebih produktif. penyediaan akses sanitasi yang layak dapat membantu mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Perbaikan sanitasi yang layak merupakan faktor penting dalam menjaga Kesehatan masyarakat, program ini dapat membantu mengurangi angka penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi air dan lingkungan sehingga meningkatkan kesehatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi layak masyarakat desa dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Mereka dapat hidup lebih nyaman dan sehat. Program Desa Dampungan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas

hidup masyarakat desa dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

Gambar 12 Perbaikan RTLH



Sumber: Dokumen Desa Mlilir, Oktober 2023

Gambar 13 Sesudah Perbaikan RTLH



Sumber: Dokumentasi Pribadi 12 Februari 2024

Responden kedua memberikan tanggapan mengenai manfaat yang didapatkan dari adanya Program Desa Dampingan mengenai bantuan RTLH selain dapat mengurangi beban pengeluaran ia merasa lebih aman dan nyaman.

“Adanya bantuan RTLH ini saya tidak perlu merasa ketakutan saat hujan karena genteng rumah ini sudah banyak yang bocor mbak jadi saya kalau hujan ketakutan apalagi rumah saya kalau hujan terenjam banjir, saya mengucapkan banyak terimakasih karena dengan hadirnya program ini saya sangat terbantu apalagi saya sudah tua tinggal sendirian jadi tidak ada yang benerin rumah saya

mbak dan tenaga saya sudah tidak kuat lagi kalau dulu pas sebelum direnovasi pas bocor sayng biarin aja paling saya tamping diember dan kalau tidur saya tidak nyaman karena bocornya ada di tempat tidur. Selain itu saya sangat terbantu dan tidak perlu memperbaiki rumah karena kan saya orang tidak punya makan aja susah mbak jadi ya saya sudah merasakan manfaat dari adanya program ini” (Wawancara Warga Ibu Ngateni, 12 februari 2024).

Kutipan wawancara diatas bahwa adanya RTLH ini responden sangat terbantu karena ia merasa tidak nyaman dan aman, adanya RTLH sangat membantu khususnya bagi kelompok masyarakat rentan karena usia yang tidak lagi produktif tidak mampu untuk melakukan renovasi. Maka dari itu manfaat yang diterima responden sudah dirasakan dan sudah tepat menysasar bagian kelompok rentan, Kesimpulan dari penulis mengenai RTLH program ini membantu meningkatkan kondisi perumahan di desa dengan memperbaiki atau membangun Kembali rumah yang sudah tidak layak ditempati atau dihuni, hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sehat untuk mereka tinggal, selain itu dampak yang dirasakan masyarakat bahwa RTLH ini memberikan manfaat ekonomi bagi penerima bantuan dengan memberikan bantuan material dan tenaga kerja dapat membantu mengurangi beban finansial masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan perbaikan rumah sendiri dan mengurangi beban pengeluaran, kedepannya dengan memperbaiki kondisi perumahan program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan khususnya pada kelompok rentan.

Program Desa Dampingan juga menysasar warga yang tidak memiliki rumah layak huni, sebagian besar warga Desa Mlilir bertempat tinggal di rumah kayu yang kondisinya sudah tidak layak. Teori Implementasi kebijakan Grindle mengkategorikan kebijakan dalam beberapa gagasan, salah satunya dalam *content of policy* yang harus memberikan perubahan pada lingkungan kebijakannya. Derajat perubahan, dari sebuah kebijakan tentunya memiliki target yang harus dicapai. Dengan artian bahwa dalam implementasi suatu kebijakan haruslah memiliki perubahan yang besar serta memiliki skala capaian yang jelas.

Kebijakan Program Desa Dampingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui jambanisasi, serta bantuan RTLH harus memberikan perubahan bagi Desa Mlilir.

Kebijakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jambanisasi memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga Desa Mlilir. Dengan adanya program perbaikan rumah tidak layak huni, warga desa mendapatkan akses untuk meningkatkan kondisi tempat tinggal mereka menjadi lebih layak huni dan nyaman. Rumah yang diperbaiki memberikan perlindungan yang lebih baik dari cuaca eksternal, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan rasa keamanan dan privasi. Selain itu, program jambanisasi juga memberikan manfaat besar bagi warga desa dengan meningkatkan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Dengan adanya jamban yang layak, warga desa dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, seperti diare dan penyakit lainnya yang dapat ditularkan melalui limbah manusia. Selain itu, dengan memiliki fasilitas jamban yang memadai, masyarakat Desa Mlilir dapat meningkatkan kebersihan lingkungan secara keseluruhan, mengurangi pencemaran air tanah, dan meningkatkan kualitas air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni dan jambanisasi memberikan perubahan yang signifikan bagi warga Desa Mlilir, baik dari segi kesejahteraan, kesehatan, maupun lingkungan. Ini adalah langkah-langkah penting yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di tingkat lokal.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Program Desa Dampingan pada Desa Mlilir Kabupaten Grobogan merupakan sebuah langkah yang tepat dan relevan. Program ini mencerminkan kesadaran pemerintah untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada daerah-daerah pedesaan, seperti Desa Mlilir, yang menjadi desa miskin ekstrem. Melalui program ini, Desa Mlilir menerima berbagai jenis bantuan dan dukungan, baik dalam bentuk infrastruktur maupun program pembangunan lainnya. Ini termasuk perbaikan infrastruktur dasar seperti jambanisasi, perbaikan RTLH, dan pemberian bibit tanaman hingga pemberian bantuan modal dan sembako yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Grindle dalam gagasan *context of implementation* mengutarakan bahwa implementasi kebijakan harus disesuaikan dengan konteks dan lingkungan yang akan menerima

kebijakan. Pemerintah sebagai aktor pembentuk kebijakan berhasil menciptakan serta menjalankan Program Desa Dampingan melalui strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Mlilir yang dibawah oleh Badan Kesbangpol Jawa Tengah. Tentunya, kebijakan ini menyasar pada desa-desa yang tergolong dalam desa miskin ekstrem sehingga program ini tidak akan salah sasaran.

Selain itu, program ini juga mencakup berbagai program pengembangan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, program Desa Dampingan di Desa Mlilir, Grobogan, tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat jangka pendek, tetapi juga berfokus pada upaya-upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan penciptaan kondisi yang memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan lokal mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Desa Dampingan di Desa Mlilir, Grobogan, merupakan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Provinsi Jawa Tengah.

Program Desa Dampingan di Desa Mlilir, Grobogan, dirancang dengan pendekatan yang berbasis pada survei dan evaluasi yang cermat, dibantu oleh pemerintah desa dan lembaga terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat setempat. Dilakukan survei menyeluruh untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Mlilir. Survei ini mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah desa dan lembaga terkait dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi riil di lapangan. Selanjutnya, hasil survei tersebut dievaluasi secara seksama untuk menentukan jenis bantuan dan program pembangunan yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Mlilir. Dengan melibatkan pemerintah desa dan lembaga terkait dalam proses survei dan evaluasi, program Desa Dampingan dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar

relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini juga membantu dalam meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam distribusi bantuan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program.

Keberhasilan sebuah kebijakan, seperti Program Desa Dampingan di Desa Mlilir, Grobogan, tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh respons positif dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Grindle dalam teorinya tentang implementasi kebijakan melalui *context of implementation*, penting untuk memperhatikan respon dan partisipasi aktif dari masyarakat agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah desa Mlilir memiliki peran kunci dalam menggerakkan dan mendukung pelaksanaan program ini. Tanggapan positif dari pemerintah desa, termasuk dukungan dalam hal administrasi, koordinasi, dan pengawasan, sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan mempromosikan pemahaman tentang manfaat program juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program tersebut. Dalam konteks Desa Mlilir, masyarakat yang menerima bantuan dari program ini perlu memberikan respons yang positif dan menerima bantuan tersebut dengan baik. Tanggapan positif dari masyarakat dapat tercermin dalam partisipasi aktif mereka dalam pelaksanaan program, penerimaan terhadap perubahan yang dibawa oleh program, serta dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak terkait. Dengan adanya tanggapan positif dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Mlilir, program Desa Dampingan dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Respons positif ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan program, meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan program, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian penelitian ini dapat disimpulkan implementasi Program Desa Dampungan berhasil karena peranan masyarakat yang responsif, keberhasilan program ditentukan oleh Pertama, *content of policy* memiliki kepentingan untuk masyarakat, tipe manfaat yang didapatkan adalah manfaat positif bagi sasaran program desa dampungan, derajat perubahan yang diinginkan masyarakat tercapai, letak pengambilan keputusan karena peran aktif dari pelaksana yakni Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa Mlilir berjalan baik karena komunikasi serta koordinasi dari pelaksana aksi, sumber daya yang dikomitmen yakni sumber daya manusia yang terlatih yakni Badan Kesbangpol karena terlatih dan relevan dengan bidangnya serta anggaran yang memadai. Kedua, *context of implementation* dalam kekuasaan dan kepentingan tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat ada kepentingan elit didalamnya, karakteristik lembaga demokratis karena adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, daya tanggap dan kepatuhan masyarakat Desa Mlilir responsif atas pelaksanaan program sehingga pelaksanaan program berjalan baik.

Dampak Program Desa Dampungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mlilir ialah Pertama, peningkatan pendapatan melalui bantuan modal yang diberikan serta pelatihan bagi pemilik usaha rumahan tentunya dapat meningkatkan pendapatan karena adanya dukungan finansial serta bertambahnya skill dalam mengembangkan usaha, Kedua, meenggerakkan ekonomi lokal dalam hal ini Program Desa Dampungan mendukung masyarakat dalam mengembangkan usahanya secara mandiri yang kedepannya masyarakat tidak bergantung kepada pihak luar. Teori Implementasi kebijakan Grindle mengkategorikan kebijakan dalam beberapa gagasan, salah satunya dalam *content of policy* yang harus memberikan perubahan pada lingkungan kebijakannya. Derajat perubahan, dari sebuah kebijakan tentunya memiliki target yang harus dicapai. Dengan artian bahwa dalam implementasi suatu kebijakan haruslah memiliki perubahan yang besar serta memiliki skala capaian yang jelas.

Kebijakan Program Desa Dampungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui jambanisasi, serta bantuan RTLH harus memberikan perubahan bagi Desa Mlilir. Dalam hal ini masyarakat sangat terbantu maupun dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam konteks Desa Mlilir, masyarakat yang menerima bantuan dari program ini perlu memberikan respons yang positif dan menerima bantuan tersebut dengan baik. Tanggapan positif dari masyarakat dapat tercermin dalam partisipasi aktif mereka dalam pelaksanaan program, penerimaan terhadap perubahan yang dibawa oleh program, serta dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak terkait. Dengan adanya tanggapan positif dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Mlilir, program Desa Dampungan dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Respons positif ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan program, meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan program, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.

Program Desa Dampungan sangat penting eksistensinya dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan hal tersebut dibuktikan dengan penurunan jumlah warga miskin yang sebelum pelaksanaan program desa dampungan di tahun 2023 berjumlah 64 KK, kemudian setelah adanya program ini mengalami penurunan sebanyak 52 kartu keluarga, sehingga didapat warga miskin di Desa Mlilir tahun 2024 sebanyak 12 kartu keluarga.

Dalam kajian penelitian ini memiliki keterbatasan informasi yang dibutuhkan karena kurangnya keterbukaan dari Badan Kesbangpol, sehingga data yang dihimpun kurang mendalam. Keterbatasan peneliti perlu dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Program Desa Dampungan, dengan waktu lama agar data yang dihimpun semakin banyak di dapatkan. Dengan memperhatikan keterbatasan dalam penelitian ini penulis harap penelitian selanjutnya dapat menemukan fakta lain sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian.

B. Saran

1. Bagi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, baiknya untuk terbuka dengan peneliti. Karena dalam penelitian ini banyak informasi maupun data yang dapat dihimpun sehingga penelitian kurang menyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1 ed.). (E. D. Lestari, Ed.) CV Jejak. Retrieved November 5, 2023
- Antara. (2023, Januari 25). *Koran Jakarta*. (M. Widiarto, Editor) Retrieved Maret 26, 2024, from koran-jakarta.com: <https://koran-jakarta.com/ganjar-izinkan-kades-geser-bantuan-pemprov-untuk-tangani-kemiskinan?page=all>
- Arif, S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14-31. Retrieved November 6, 2023
- Assyakurrohim, D., & dkk. (2022, Februari 1). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Volume 3*, 1-9. Retrieved November 5, 2023
- Asus Maizar Suryanto Hertika, M. F. (2019). Program Pemberdayaan PKK melalui Program Pengembangan Sistem Akuaponik di Desa Ampeldento, Karangploso, Malang.
- Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022, April 20). Peran Lazis Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Syntax Admiration, Vol 3 No 4*, 675-685. Retrieved November 6, 2023, from <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/416/711>
- BPS. (2023, 04 10). Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id/publication/2023/04/10/9b92ae44d5ad1a33fb2a297c/data-dan-informasi-kemiskinan-provinsi-jawa-tengah-2018-2022.html>
- BPS Prov. Jateng. (2013). *Presentase Angka Kemiskinan Jawa Tengah*.
- BPS Prov. Jateng. (2022). *Presentase Angka Kemiskinan Jawa Tengah*.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry & Research Design* (4 ed.). Sage Publications. Retrieved November 2, 2023
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022, Juli). Model Implementasi Kebijakan Merileed Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Loka Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Studi Media, Vol 7 No 1*, 123-133. Retrieved November 1, 2023, from <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialog/article/view/2067/1190>

- Gani, K. A. (2022, November 26). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap. *Thesis*, 1-65.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Implementation in the Third World*. United Kingdom: Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Hakim, A., & Nashrullah, H. (2023, Juli 24). *Antara*. (M. Yusuf, Editor) Retrieved November 2023, 2023, from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/3649986/khofifah-sebut-program-pengentasan-kemiskinan-di-jatim-efektif>
- Hardiningsih, H. S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*.
- Jateng, B. P. (2023). *Laporan Progres Bulanan Kegiatan Desa Dampungan*. Semarang.
- Jateng, P. (2019, Juni). *Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Sejahtera*. Retrieved from SiLap Online: <https://silap-online.kesra.jatengprov.go.id/data/download/6>
- Jatenggayeng. (2023, Maret 4). *Jatenggayeng*. Retrieved November 8, 2023, from Jatengprov: <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-minta-seluruh-daerah-replikasikan-satu-opd-satu-desa-dampungan/>
- Jatengprov. (2019, Juli 22). *Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved April 18, 2024, from Jatengprov: <https://jatengprov.go.id/publik/desa-dampungan-diluncurkan-ganjar-pesan-skpd-agar-lebih-jeli/>
- Jatengprov. (2023, 7 10). Retrieved from jatengprov.go.id: jatengprov.go.id
- Jawa Tengah, P. P. (2019, Juli 22). *Portal Berita Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved Maret 24, 2024, from jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/publik/desa-dampungan-diluncurkan-ganjar-pesan-skpd-agar-lebih-jeli/>
- Jumriani. (2023). *Kajian-Kajian Lokal Kalimantan Selatan* (1 ed.). (E. W. Abbas, Ed.) PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM-Anggota IKAPI). Retrieved November 21, 2023
- Kehik, B. S. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, Vol 3 No 1, 4-5. Retrieved November 15, 2023
- Kesbangpol Jateng. (2022). *Program Desa Dampungan Desa Mlilir*. Semarang.

- Khotimah, K., & Hertati, D. (2021, Oktober). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Policy Evaluation of Cash Social Assistace Program. *Jurnal Governansi, Volume 7 Nomor 2*, 99-110. doi:<https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230>
- Kominfo, A. (2023, Maret 28). *Dinkominfo Demak*. Retrieved November 9, 2023, from Dinkominfo Demak: dinkominfo.demakkab.go.id
- ling, P. R. (2023, Januari 31). *Cakra Bangsa*. Retrieved November 13, 2023, from Media Cakra Bangsa: <https://mediacakrabangsa.id/gubernur-jateng>
- Magdalena, C., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Program CSR Bank Jateng dalam Kebijakan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-15.
- Makbul, M. (2021). Metode Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian. *Thesis*, 1-34. Retrieved November 5, 2023
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications. Retrieved November 10, 2023
- Mlilir, D. (2023). *Laporan Penerima Bantuan*.
- Mubarok, S., & dkk. (2020, February 1). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Administration Studies, Vol 5 No 1*, 33-38. Retrieved October 2, 2023, from <http://www.jpas.ub.ac.id/Index.php/jpas>
- Muh. Fachri Arsjad, R. H. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyada.
- Muhtadi, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Tangerang. *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol 20 No 2*, 188-197. Retrieved November 7, 2023
- Mulyati, Y., Setyawati, I. E., & Suganda, D. A. (2022, Agustus-Oktober). Potensi Petani Milenial Jawa Barat Dalam Mendongkrak Perekonomian Nasional Melalui Ekspor Produk Perkebunan. *Journal Publicuho, Vol 5 No 3*, 963-977. Retrieved from <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/43/36>
- Mursyidah, L. (2017, September 30). Efektivitas Program Bantuan Tunai Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 5 No 2*, 246-260. doi:10.21070/jkmp.v5i2.1882

- Nakluy, F. S. (2015). Analisis Faktor dan Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Indikator Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Thesis*, 1-85. Retrieved November 14, 2023
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 8 No 3*, 14-145. Retrieved 10 31, 2023, from <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799/1295>
- Nugroho, W. A. (2023). *Pemprov Jateng Optimalkan Program "Satu OPD Satu Desa Dampungan"*. Antara Jateng. Retrieved Maret 22, 2024, from <https://jateng.antaranews.com/berita/484368/pemprov-jateng-optimalkan-program-satu-opd-satu-desa-dampungan>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2021). *Analisis Kebijakan Publik* (1 ed., Vols. 1-147). Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. Retrieved Februari 16, 2024
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan.
- Pemprov Jateng. (2019, April 5). *Buku Panduan Desa Dampungan*. Retrieved 2024, from SiLap Online.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018, Juni 1). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), Volume 4 No 1*, 1-9. Retrieved November 20, 2023
- Putera, R. E. (n.d.). Analisis Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia .
- Putra, A. A. (2019, Agustus 8). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Volume 6 No 8*, 1-8. Retrieved Oktober 30, 2023, from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/issue/current>
- Qamariah, d. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu).
- Qamariah, M., Afifuddin, & Suyeno. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik, Vol 14 No 4*, 1-7. Retrieved November 8, 2023
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish. Retrieved November 5, 2023

- Santifa, M., Warjio, Harahap, D., & Isnaini. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Vol 1 No 1*, 89-99. Retrieved 10 31, 2023, from <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/25/pdf>
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019, Mei 2). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *Jorunal of Public Sector Innovation, Vol 3 No 2*, 68-74. Retrieved November 21, 2023
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter dalam Prespektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan pendidikan: Fondasi dan Aplikas*.
- Sofianto, M. Z. (2019). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia.
- Statistik, B. P. (2013, 07 01). Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: [https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2013/07/01/459/profil-kemiskinan-di-provinsi-jawa-tengah-maret-2013-jumlah-penduduk-miskin-maret-2013-mencapai-4-733-juta-orang.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20\(penduduk%20yang,\(14%2C98%20persen\).](https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2013/07/01/459/profil-kemiskinan-di-provinsi-jawa-tengah-maret-2013-jumlah-penduduk-miskin-maret-2013-mencapai-4-733-juta-orang.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20(penduduk%20yang,(14%2C98%20persen).)
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. 215. Retrieved November 2, 2023
- Suryati, D., & Salkiah, B. (2019, Juli). Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada UMKM di Kota Mataram. *Vol 13 No 12*, 1823-1832. Retrieved 10 31, 2023, from <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/266>
- Susanto, S. M. (2022). *Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebagai Upaya Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Magelang: Unima Press.
- Tama, Y. W. (2023). Tinjauan Literatur Program One Pesantren One Product dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Jawa Barat Ekonomi Berkelanjutan & Berkeadilan. 1-60. Retrieved from <http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/830>
- Tengah, P. J. (2019). Retrieved January 25, 2024, from SiLap Online: <https://silap-online.kesra.jatengprov.go.id/>
- Tengah, P. J. (2023). Retrieved from SiLap Online: <https://silap-online.kesra.jatengprov.go.id/>

- Turama, A. R. (n.d.). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsonss. *Journal Systems UNPAM*.
- Wachidah, M. F., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (2022, Januari 01). Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 01, 124-132. Retrieved Maret 19, 2024
- Wahidah, A. Z., & dkk. (2022, April). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi COVID-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Journal of Management Studies*, Vol 16 No 1, 51-63. Retrieved Oktober 30, 2023, from <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/14429/6604>
- Wekke, I. S., & dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku. Retrieved 10 4, 2023
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. (Y. S. Setiyono Wahyudi, Ed.) Malang: Media Nusa Creative. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=1zQXEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=NkI-3b_cuH&dq=scanning%20dalam%20kebijakan%20publik&lr&hl=id&pg=PA9#v=onepage&q=scanning%20dalam%20kebijakan%20publik&f=false
- Yuliah, E. (2020). Impelementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol 30 No 2 Tahun 2020, 129-153. Retrieved April 30, 2024
- Yusri, M. (2023). Analisis Deskriptif Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. *Jurnal Somasi*.
- Zuhri, S. (2020). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal PKS*.

LAMPIRAN

Wawancara Perangkat Desa Mlilir, 12 Februari 2024



Wawancara Kepala Desa Mlilir Bapak Mohammad Khambali, 12 Februari 2024



Wawancara Warga penerima RTLH Ibu Ngateni, 12 Februari 2024



Wawancara Warga penerima bantuan modal Ibu Darwati, 12 Februari
2024



Wawancara Warga penerima bantuan uang dan sembako Ibu Febri, 12
Februari 2024



Wawancara warga Ibu Sumarti, 17 April 2024



Daftar penerima bantuan sembako

DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SEMBAKO DARI BANK MAYAPADA
DESA MLILIR KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	NO RUK
1.	SITI BAROKAH	DESA MLILIR RT 01 RW 01	
2.	SUGENG RIYANTO	DESA MLILIR RT 03 RW 01	
3.	KURBAN	DESA MLILIR RT 02 RW 03	
4.	SITI MUZA ROAH	DESA MLILIR RT 04 RW 01	
5.	NGUSMAN	DESA MLILIR RT 03 RW 01	
6.	HADI	DESA MLILIR RT 03 RW 01	
7.	TOHIRON	DESA MLILIR RT 03 RW 01	
8.	HARTINI	DESA MLILIR RT 04 RW 03	
9.	SUDIRO	DESA MLILIR RT 02 RW 02	
10.	SUTADI	DESA MLILIR RT 02 RW 02	
11.	SUTAR	DESA MLILIR RT 04 RW 02	
12.	PASIMAN	DESA MLILIR RT 04 RW 02	
13.	DARSH	DESA MLILIR RT 03 RW 02	
14.	DURAHMAN	DESA MLILIR RT 03 RW 02	
15.	UFI AISYIYAH	DESA MLILIR RT 01 RW 02	
16.	MUR CHAMIDAH	DESA MLILIR RT 01 RW 02	
17.	SRILESTARI	DESA MLILIR RT 04 RW 04	
18.	TANWIRIOTUS ZAKIYAH	DESA MLILIR RT 02 RW 04	
19.	SOLEKAH	DESA MLILIR RT 04 RW 04	
20.	SUARWATI	DESA MLILIR RT 02 RW 04	
21.	SUMARTI	DESA MLILIR RT 04 RW 04	
22.	SITI PASIAH	DESA MLILIR RT 04 RW 04	
23.	AHMADIN	DESA MLILIR RT 03 RW 04	
24.	MUR AMINAH	DESA MLILIR RT 03 RW 04	
25.	M. TOHA	DESA MLILIR RT 01 RW 03	
26.	KUSNO	DESA MLILIR RT 01 RW 03	
27.	MUNADI	DESA MLILIR RT 04 RW 03	
28.	ARUM SUTEJO	DESA MLILIR RT 02 RW 03	
29.	RIYADI	DESA MLILIR RT 03 RW 03	
30.	SUGENG RIYADI	DESA MLILIR RT 01 RW 03	
31.	PURYOTO	DESA MLILIR RT 03 RW 03	
32.	SUYONO	DESA MLILIR RT 04 RW 03	
33.	AHMAD SHOBRIN	DESA MLILIR RT 04 RW 03	
34.	MARKAIN	DESA MLILIR RT 01 RW 06	
35.	PATMAN	DESA MLILIR RT 01 RW 06	
36.	SETYOWATI	DESA MLILIR RT 03 RW 06	
37.	KIRNAWAN	DESA MLILIR RT 03 RW 06	
38.	MOHSOLIKIN	DESA MLILIR RT 02 RW 06	

39.	SURTI	DESA MLILIR RT 02 RW 06	
40.	DARMINAH	DESA MLILIR RT 03 RW 06	
41.	SUTADI	DESA MLILIR RT 03 RW 06	
42.	SITI KHOTIJAH	DESA MLILIR RT 02 RW 05	
43.	SRI SUMARSHIN	DESA MLILIR RT 01 RW 05	
44.	PAUYANI	DESA MLILIR RT 04 RW 05	
45.	YULIA ULFA	DESA MLILIR RT 01 RW 05	
46.	HARSOYO	DESA MLILIR RT 01 RW 05	
47.	ISA PUSPITASARI	DESA MLILIR RT 04 RW 05	
48.	DAMBIRI	DESA MLILIR RT 04 RW 05	
49.	SUGI CANI	DESA MLILIR RT 04 RW 05	
50.	LAMYADI	DESA MLILIR RT 03 RW 01	

Mlilir, 19 April 2023
Kepala Desa Mlilir

ABDUL LATIF

Daftar penerima bibit jambu air

**PENYALURAN BIBIT JAMBU AIR DAN RAMBUTAN
DESA MLILIR KEC GUGUG KAB GROBOGAN
TAHUR 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BIBIT	JUMLAH BIBIT
1	Purnomo	Milir, 4/6		10
2	Lamyadi	Milir, 3/3		10
3	Munadi	Milir, 4/3		6
4	Andi S	Milir, 3/6		6
5	Ahmadi	Milir, 3/2		10
6	Puryoto	Milir, 3/3		5
7	Sholikin	Milir, 2/5		2
8	Nurulim	Milir, 1/3		3
9	Darwati	Milir, 3/5		5
10	Tatik	Milir, 2/6		5
11	Masriah	Milir, 1/5		3
12	Baim	Milir, 2/6		10
13	Fatmah	Milir, 4/2		4
14	Karimah	Milir, 2/5		2
15	Ahmad Munif	Milir, 4/4		4
16	Very	Milir, 2/2		4
17	Kariman	Milir, 3/5		4
18	Rokan	Milir, 2/5		4
19	Layanan Desa	Milir, 2/5		20
20	Zuliyanti	Milir, 2/3		2
21	Suryanah	Milir, 4/4		2
22	Fita S	Milir, 3/4		2
23	Susilowati	Milir, 3/6		2
24	Sulistuti	Milir, 2/6		2
25	Siti Fatimah	Milir, 3/5		2
26	Darwati	Milir, 1/3		2
27	Rumiyah	Milir, 4/4		2
28	Sumiyati	Milir, 4/4		2
29	Mahya	Milir, 4/6		2
30	Rukah	Milir, 4/3		2
31	Sukarni	Milir, 4/2		2
32	Mariyah	Milir, 1/6		2
33	Yanti	Milir, 1/3		2
34	Sufarti	Milir, 3/6		2
35	Hartik	Milir, 3/4		2
36	muntamah	Milir, 1/2		2
37	Muslikah	Milir, 3/2		2
38	Khuzaimah	Milir, 3/6		2
39	Fitik Haryanti			2

Daftar penerima bantuan kesbangpol

**DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN DARI KESBANGPOL
BERSUMBER DARI BAZNAS PROVINSI**

NO	NAMA	ALAMAT	NO NIK
1.	SUNARYO	DESA MLILIR RT 01 RW 01	
2.	KURIAN	DESA MLILIR RT 02 RW 01	
3.	AHMAD WAHYUDI	DESA MLILIR RT 03 RW 01	
4.	SITI MUZA ROAH	DESA MLILIR RT 04 RW 01	
5.	SITI ZUMROH	DESA MLILIR RT 03 RW 01	
6.	TARMUDJI	DESA MLILIR RT 01 RW 02	
7.	MARMI	DESA MLILIR RT 02 RW 02	
8.	MASROCHAN	DESA MLILIR RT 03 RW 02	
9.	MOHAMMAD EKO SIGIT PRASETIYO	DESA MLILIR RT 01 RW 03	
10.	MANSUR	DESA MLILIR RT 04 RW 02	
11.	BAMBANG HERUYANTO NURSALIM	DESA MLILIR RT 01 RW 04	
12.	SUMANAH	DESA MLILIR RT 03 RW 04	
13.	CAHYANING WIYANTI	DESA MLILIR RT 01 RW 04	
14.	MOCH AMIN RIYANTO	DESA MLILIR RT 03 RW 04	
15.	ANS RINI NURCAHYANI	DESA MLILIR RT 03 RW 04	
16.	WASILAH	DESA MLILIR RT 01 RW 03	
17.	PARMI	DESA MLILIR RT 03 RW 03	
18.	ARLUM SUTEJO	DESA MLILIR RT 02 RW 03	
19.	MASAMAH	DESA MLILIR RT 02 RW 03	
20.	SULASI	DESA MLILIR RT 02 RW 06	
21.	MUNDARI	DESA MLILIR RT 02 RW 06	
22.	JAYUS	DESA MLILIR RT 03 RW 06	
23.	SITI AMINAH	DESA MLILIR RT 02 RW 06	
24.	SITI SUPARMI	DESA MLILIR RT 02 RW 06	
25.	DJUMALI	DESA MLILIR RT 02 RW 05	
26.	DARSAN	DESA MLILIR RT 01 RW 05	
27.	SENEH	DESA MLILIR RT 04 RW 05	
28.	DASLAN	DESA MLILIR RT 04 RW 05	
29.	SITI MARYATI	DESA MLILIR RT 01 RW 05	
30.	SITI MUZAROTUN	DESA MLILIR RT 01 RW 05	

Milir, 04 April 2023
Kepala Desa Milir

MOHAMMAD KHAMBALI

Daftar penerima bantuan jamban

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA
BANTUAN JAMBAN
TAHUN 2023

NO.	NAMA	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
				DUSUN	RT	RW
1.	MUSRIPAH	L	PETANI	MLILIR	1	1
2.	ABDUL AZIZ	L	PETANI	MLILIR	2	1
3.	HARDJONO	L	PETANI	MLILIR	2	2
4.	MARYAMAH	P	PERDAGANGAN	MLILIR	1	2
5.	KUSNO	L	PETANI	MLILIR	1	3
6.	SULAIKHAH	P	PETANI	MLILIR	4	3
7.	NUR AMINAH	P	WIRASWASTA	MLILIR	3	4
8.	SITI MARKONAH	P	KARYAWAN SWASTA	MLILIR	4	4
9.	AHMADIN	L	WIRASWASTA	MLILIR	3	4
10.	ROHMAD	L	PETANI	MLILIR	2	5
11.	HERU IRAWAN	L	KARYAWAN SWASTA	MLILIR	2	5
12.	NGASIMAH	P	MENGURUS RT	MLILIR	1	5
13.	PARTI	P	PETANI	MLILIR	3	5
14.	SITI KHOTIMAH	P	WIRASWASTA	MLILIR	4	5
15.	MUHAMAD EKO	L	PETANI	MLILIR	4	6
16.	DARMINAH	P	KARYAWAN SWASTA	MLILIR	4	6
17.	KASMI	P	PETANI	MLILIR	4	6
18.	RULI SUNANDAR	L	TUKANG LAS	MLILIR	4	6

KEPALA DESA MLILIR

[MOHAMMAD KHAMBALI]

Keterangan:
Jenis Pekerjaan
1) petani pemilik lahan
2) petani penggarap/penyewa
3) buruh tani
4) nelayan pemilik perahu
5) nelayan penyewa perahu
6) buruh nelayan
7) buruh pabrik
8) guru sekolah umum
9) guru agama
10) pedagang barang
11) pedagang makanan
12) RT (Pembantu Rumah Tangga)
13) Pemulung
14) Buruh Bangunan
99) lainnya

Daftar penerima RTLH

No	Nama	Alamat	NIK	Jabatan
1	Ahmad shobirin	Desa Mlilir Rt 04 Rw 03		Penerima 1
2	Budi raharjo	Desa Mlilir Rt 03 Rw 04		Penerima 2
3	Marjo	Desa Mlilir Rt 01 Rw 05		Penerima 3
4	Maschud	Desa Mlilir Rt 04 Rw 02		Penerima 4
5	Mashadi	Desa Mlilir Rt 01 Rw 03		Penerima 5
6	Ngateni	Desa Mlilir Rt 03 Rw 06		Penerima 6
7	Sodiq	Desa Mlilir Rt 03 Rw 01		Penerima 7
8	Suhadi	Desa Mlilir Rt 01 Rw 06		Penerima 8
9	Suladi	Desa Mlilir Rt 01 Rw 06		Penerima 9
10	Sulimah	Desa Mlilir Rt 02 Rw 03		Penerima 10

RPJMD Provinsi Jawa Tengah

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi dan *focussing* penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, pengembangan Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PKPP), dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 OPD minimal 1 desa miskin” dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | VI - 24

Daftar Desa Dampungan 2023

REKAPITULASI DESA DAMPINGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	LOKASI			TAHUN MULAI PENDAMPINGAN
		KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	
A. LINGKUP ASISTEN I					
1	INSPEKTORAT	PEMALANG	PETARUKAN	SERANG	2023
2	SET DPRD	BREBES	BANTARKAWUNG	WARU	2023
3	SET DPRD	PURBALINGGA	KARANGANYAR	JAMBENSA	2023
4	BAKESBANGPOL	GROBOGAN	GURUG	MULIR	2023
5	SATPOL PP	MAGELANG	KALANGKRIK	MUNGKINGGARI	2023
6	DINAS KESEHATAN	PEMALANG	WATUKRUPUK	TUNDAGAN	2023
	DINAS KESEHATAN	GROBOGAN	KARANGAYUNG	KARANGAYAR	2023
	DINAS KESEHATAN	CILACAP	CIMANGGU	KARANGSARI	2023
	DINAS KESEHATAN	WONOSOBO	KEPEL	GADINGLURUH	2023
	DINAS KESEHATAN	CILACAP	KAWUNGANTEN	KUBANGKAWUNG	2023
	DINAS KESEHATAN	CILACAP	CIMANGGU	BANTARHANGU	2023
	DINAS KESEHATAN	CILACAP	KESUGIHAN	KARANGSOKOL	2023
	DINAS KESEHATAN	BLORA	BANJAREJO	BACEM	2023
	DINAS KESEHATAN	CILACAP	KESUGIHAN	DONOREJO	2023
7	DISNAKERTRANS	WONOSOBO	SAPURAN	TEMPURSARI	2023
8	DISPORAFAR	MAGELANG	BOROBUDUR	GIRITENGAH	2023
	DISPORAFAR	KLATEN	JATROH	TIBAYAN	2022
9	DINAS PEREMPUAN DAN ANAK	DEMAK	BONANG	WEDENG	2023
10	DISPERHAPDES	MAGELANG	KALANGKRIK	TEHANGULUNG	2023
	DISPERHAPDES	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	TLAGAWERA	2023
11	DINAS AIRPUS	GROBOGAN	KARANGAYUNG	KARANGSONO	2023
12	DISOKRUBUD	BREBES	SURAMPOG	BRIDADI	2023
	DISOKRUBUD	REMBANG	PAMOTAN	RUNGIN	2023
	DISOKRUBUD	BLORA	BANJAREJO	REHANGGAYAH	2023
	DISOKRUBUD	WONOSOBO	KEPEL	KALWALUH	2023
	DISOKRUBUD	PURBALINGGA	BOROTSARI	PAKUNJEN	2023
	DISOKRUBUD	WONOGIRI	NGADIROJO	PUDOMANIS WETAN	2023
	DISOKRUBUD	WONOGIRI	NGADIROJO	GEMAWANG	2023
	DISOKRUBUD	BANYUWAS	PURWODI	KALITATEN	2023
	DISOKRUBUD	PURWOREJO	BENER	BLEBER	2023
	DISOKRUBUD	BANJARNEGARA	TRIGALUH	PUNGANBA	2023
	DISOKRUBUD	BANJARNEGARA	PAGENTAN	PAGENTAN	2023
13	DINAS SOSIAL	BLORA	BANJAREJO	BALONGSARI	2023
14	RSJ Dr. ARMO GONDHUTOMO	DEMAK	BONANG	SUMBERJO	2023
15	RSJ Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	BANYUMAS	KARANGLEWAS	TAMANSARI	2023
16	RSJ TUGUREJO	WONOGIRI	NGADIROJO	KERJO KEDIL	2023
17	RSJ Dr. HOEDAWADI	KLATEN	SUWIRING	SERENDI	2023
18	RSJ Dr. RM. SOEDJARWADI	KLATEN	MANISRENGGO	BORANGAN	2023
19	RSJ KELET	PURWOREJO	KALIGESING	DONOREJO	2022
20	RSJ SUBAKARTA	REMBANG	SALE	BANCANG	2023
21	RSJ SURAKARTA	BLORA	KUNDURIAN	KLOKAP	2022
22	BIRO PENYITAKER	SRAGEN	KARANGALANG	KEDJONGWADUK	2023
23	BIRO KRISA	DEMAK	SAYUNG	PRAMPILAN	2023
		GROBOGAN	NGARUNGAN	BANDUNGSAJI	2023
B. LINGKUP ASISTEN II					
24	DINAS ESDM	DEMAK	BONANG	KIRAMBOGO	2023
	DINAS ESDM	PEMALANG	PETARUKAN	WIDODAREN	2023
	DINAS ESDM	REMBANG	SUMBER	RONGGO MULYO	2023
	DINAS ESDM	SRAGEN	FANGEN	NGURUBO	2023
	DINAS ESDM	MAGELANG	KALANGKRIK	NGAWONGGO	2023
	DINAS ESDM	KEBUMEN	KLIKING	TAMBAKPRIGATEN	2023
	DINAS ESDM	CILACAP	CIMANGGU	MANDALA	2023
	DINAS ESDM	PURBALINGGA	KUTASARI	KARANGEGAK	2023
25	DINAS PERTANIAN	CILACAP	ADIPALA	KARANGSARI	2023
26	DINAS PUSDATARU	GROBOGAN	NGARUNGAN	BELOE	2023
27	DISPERINDAG	WONOSOBO	KEPEL	PULOSARAN	2023
28	DINAS LHK	WONOSOBO	WATUKRUPUK	WONOSROYO	2023
	DINAS LHK	KEBUMEN	SURUPEN	PEKELPON	2023
	DINAS LHK	BANYUMAS	BANYUMAS	BINANGUN	2023
	DINAS LHK	PURWOREJO	LODRO	TEPANSAJI	2022
29	DINAS KOPERASI DAN UKM	WONOSOBO	SAPURAN	BANYUPADAL	2023
	DINAS KOPERASI DAN UKM	BANYUMAS	PEKUNJEN	KARANGKEMIRI	2022
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	SRAGEN	MONDOKAN	TEMPLEJO	2023
	DINAS KETAHANAN PANGAN	PURWOREJO	BENER	KALIJAMBE	2022

Daftar Desa PKE (Penanggulangan Kemsikinan Ekstrem)

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
288	GROBOGAN	GEYER	BANGSRI
289	GROBOGAN	GEYER	JAMBANGAN
290	GROBOGAN	GEYER	KARANGANYAR
291	GROBOGAN	GEYER	NGRANDU
292	GROBOGAN	GODONG	KARANGGENENG
293	GROBOGAN	GODONG	KETANGIREJO
294	GROBOGAN	GODONG	TUNGU
295	GROBOGAN	GUBUG	MULIR
296	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	GUNUNGTUMPENG
297	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	JETIS
298	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	KARANGANYAR
299	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	KARANGSONO
300	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	KETRO
301	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	NANPU
302	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	TELAWAH
303	GROBOGAN	KEDUNGIATI	DERAS
304	GROBOGAN	KEDUNGIATI	JUMO
305	GROBOGAN	KEDUNGIATI	KALIMARO
306	GROBOGAN	KEDUNGIATI	PADAS
307	GROBOGAN	KEDUNGIATI	WATES
308	GROBOGAN	KRADENAN	BANJARDOWO
309	GROBOGAN	KRADENAN	PAKIS
310	GROBOGAN	KRADENAN	REJOSARI
311	GROBOGAN	KRADENAN	SAMBONGBANGI
312	GROBOGAN	NGARINGAN	BANDUNGSARI
313	GROBOGAN	NGARINGAN	BELOR
314	GROBOGAN	NGARINGAN	KALANGDOSARI
315	GROBOGAN	NGARINGAN	KALANGLUNDO
316	GROBOGAN	NGARINGAN	PENDEM
317	GROBOGAN	NGARINGAN	SARIREJO
318	GROBOGAN	NGARINGAN	SENDANGREJO
319	GROBOGAN	PENAWANGAN	BOLOGARANG
320	GROBOGAN	PENAWANGAN	KARANGWADER
321	GROBOGAN	PENAWANGAN	KRAMAT
322	GROBOGAN	PENAWANGAN	LAJER
323	GROBOGAN	PULOKULON	MLOWOKARANG TALUN
324	GROBOGAN	PULOKULON	RANDUREJO
325	GROBOGAN	PULOKULON	SIDOREJO
326	GROBOGAN	TANGGUNGHARJO	PADANG
327	GROBOGAN	TAWANGHARJO	TARUB
328	GROBOGAN	TOROH	DIMORO
329	GROBOGAN	TOROH	GENENGADAL
330	GROBOGAN	TOROH	GENENGSAI
331	GROBOGAN	TOROH	KATONG
332	GROBOGAN	TOROH	NGRANDAH
333	GROBOGAN	WIROSARI	MOJOREBO
334	KEBUMEN	ALIAN	KALIPUTHI
335	KEBUMEN	AMBAL	AMBALKLIWONAN
336	KEBUMEN	AMBAL	GONDANGLEGI
337	KEBUMEN	AMBAL	SIDOMULYO
338	KEBUMEN	AYAH	KALIBANGKANG
339	KEBUMEN	BUAYAN	JOGOMULYO

Daftar KK penerima bantuan kemiskinan 2024

Lampiran 1
Peraturan Kepala Desa Miller
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BWA BLT - DESA)
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
DARI APBN (DANA DESA) DESA MILLER
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	RUC	DESA_KTU	NAMA_KK	JN	ALAMAT	RT	KV	NIK	NO_KR	PEKERJAAN	JUMLAH	DESKRIPSI BANTUAN
1	01	Miller	MURMURAH	P	MILLER	01	01	33131733	33131730	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
2	01	Miller	KEMAS KUDIQ	P	MILLER	04	01	33131716	33131722	PERKAWINAN	Rp 3.000.000	DANA DESA
3	01	Miller	BUDHAK	P	MILLER	23	04	33131741	33131733	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
4	01	Miller	JUNANG	L	MILLER	04	02	38060401	33131733	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
5	01	Miller	PATRI	P	MILLER	03	03	33131778	33131730	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
6	01	Miller	WASILAH	P	MILLER	01	03	33131772	33131730	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
7	01	Miller	JUMOKAH	P	MILLER	04	04	33131771	33131730	MURAH SASTA	Rp 3.000.000	DANA DESA
8	01	Miller	SUTIK	P	MILLER	04	03	33131774	33131730	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
9	01	Miller	MASROKAR	P	MILLER	04	03	33131772	33131730	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
10	01	Miller	MASRODI	P	MILLER	04	03	33131771	33131730	MURAH SASTA	Rp 3.000.000	DANA DESA
11	01	Miller	MADAR	P	MILLER	03	03	33131771	33131730	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
12	01	Miller	KUSURAH	P	MILLER	02	04	33131774	33131730	PETANI	Rp 3.000.000	DANA DESA
			JUMLAH									



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ainnaya Dwi Agustina
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 24 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Ringinsari, RT/RW 004/002,
Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang
No. Whatsapp : 083861816232
Email : ainayaagustina2126@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mardi Siwi: 2006-2007
2. SDN Surodadi: 2007-2013
3. SMPN 2 Gringsing: 2013-2016
4. SMAN 1 Subah: 2016-2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Biro Wacana PMII Rayon FISIP Tahun 2021
2. Bendahara HMJ Ilmu Politik 2021

Demikian daftar Riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan semestinya